

PENGARUH KRISIS MALAISE TERHADAP PABRIK GULA DI KABUPATEN KLATEN SAMPAI TAHUN 1942

Rusal Mustopo

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki potensi alamiah yang sangat strategis untuk mengembangkan sektor pertanian, termasuk tanaman perkebunan. Sebagai suatu kepulauan yang terletak di daerah tropis di sekitar khatulistiwa, Indonesia memiliki beragam jenis tanah yang menguntungkan dengan sinar matahari yang konsisten sepanjang tahun sehingga kondisi yang demikian akan memberi peluang besar terhadap dikembangkannya sektor perkebunan. Salah satu perkebunan yang dikembangkan di Indonesia adalah perkebunan tebu yang menghasilkan gula.

Menurut pendapat dari Yayasan Agroekonomi (1983), perkebunan merupakan suatu penanaman yang luas, di mana dalam pengelolaannya terdapat unsur pemerintah, swasta, maupun rakyat. Sedang menurut pendapat dari Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991:3) bahwa :

Sejarah perkebunan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. Di negara-negara berkembang, pada umumnya perkebunan hadir sebagai perpanjangan tangan dari perkembangan kapitalisme agraris Barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial.

Perkebunan pada awal perkembangannya hadir sebagai sistem perekonomian baru yang semula belum dikenal, yaitu sistem perekonomian pertanian komersial (*Commercial Agriculture*) yang bercorak kolonial. Sistem perkebunan yang dibawa Pemerintah Kolonial atau yang didirikan oleh korporasi kapitalis asing itu pada dasarnya adalah sistem perkebunan Eropa (*European Plantation*), yang berbeda dengan sistem berkebun (*Garden system*) yang telah lama berlaku di negara-negara berkembang pada masa pra-kolonial. (Sartono Kartodirdjo, Djoko Suryo, 1991).

Sebagai akibat dari dibukanya perkebunan-perkebunan oleh pemerintah kolonial, termasuk di antaranya adalah perkebunan tebu, maka banyak berdiri perusahaan yang mengolah hasil-hasil dari perkebunan itu. Salah satunya adalah perusahaan gula. Sebagai salah satu komoditi unggulan saat itu, tebu banyak dikembangkan di pulau Jawa, karena selain tanahnya subur dan cocok untuk penanaman tebu, di Jawa juga terdapat¹ yang banyak dan murah.

Berhubungan dengan masalah tanah, pada masa pemerintahan Inggris, pernah dikeluarkan kebijaksanaan *stelsel* tanah pada masa Raffles (1811-1816). Pada masa Raffles ini, tanah-tanah dibagi untuk digarap oleh penduduk dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Namun kebijaksanaan *stelsel* tanah ini, ternyata mengalami kegagalan. Menurut DH. Burger (1962:128),” Kebijakan *stelsel* tanah yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat itu, ternyata mengalami kegagalan. Di Jawa pada waktu itu tidak timbul kemakmuran karena rakyat dibebani dengan pajak yang tinggi dan memberatkan”. Oleh sebab itu, menurut DH. Burger, dibawah pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch, tahun 1830 di Jawa mulai dijalankan sistem tanam paksa yang dalam beberapa hal merupakan reaksi terhadap *stelsel* tanah yang terdahulu. Van den Bosch mempergunakan desa dan rakyat di Jawa, dipaksa menanam tanaman –tanaman ekspor yang dikehendaki pemerintah. Kebijakan tanam paksa ini adalah untuk mempertinggi tanaman ekspor, dan dari beberapa jenis tanaman yang diwajibkan, terdapat tiga jenis tanaman yang penting yaitu tebu, kopi dan nila, yang kemudian diikuti oleh the, tembakau, kayu manis, kapas dan lada. (DH. Burger, 1962).

Sedang sejarah perindustrian gula di Indonesia dimulai pada abad ke-17 ketika VOC mengusahakan kira-kira seratus perkebunan gula di sekitar Batavia. Ketika VOC dibubarkan pada akhir abad ke-18, Pemerintahan Hindia Belanda melanjutkannya, untuk meningkatkan penanaman tebu dan mengekspor gula dalam rangka *Cultuurstelsel*. Dengan *cultuurstelsel* ini para petani diharuskan untuk menanam tebu (atau tanaman lain yang ditetapkan pemerintah), sebagai pembayaran pajak *in-natura*. Pemerintah memiliki dan menyelenggarakan pabrik gula, dan dapat pula memerintahkan kerja paksa pada penduduk desa untuk menjalankan pabrik itu. Pada saat dijalanannya sistem tanam paksa, pemerintah

Hindia Belanda mengeluarkan kebijaksanaan untuk mengusahakan penanaman tebu yang dilakukan di semua karesidenan yang baik untuk penanaman tebu. Beberapa karesidenan yang menjadi sasaran penanaman tebu antara lain di Karesidenan Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya dan Pasuruan. Ciri khas penanaman atau pembudi-dayaan tebu pada waktu itu, menurut Uemura Yasuo (1986:53) adalah, "Berusaha mendapatkan penen berlimpah per arealnya dengan cara menggunakan tenaga buruh yang banyak". Hal ini mengakibatkan industri gula di Jawa mencapai jaman keemasannya. Menurut Soemitro Djojohadikusumo (1972:19), "Industri gula di Jawa mencapai puncaknya pada tahun 1929 sampai tahun 1930, dimana Hindia Belanda merupakan penghasil gula nomor dua sesudah Cuba dengan produksi sebanyak 2.970.836 ton setahun".

Menurut Uemura Yasuo (1986:42), "Dalam pasal 1 Undang-undang Gula atau *Suiker wet (Indische Staatsblad 1870, No.177)*, ditetapkan bahwa penanaman tebu secara paksa di Jawa harus secara berangsur-angsur dikurangi pada tahun 1879 dan dihapuskan seluruhnya pada tahun 1891". Dalam hal ini Uemura Yasuo mengatakan:

Penanaman paksaan menjadi penanaman perusahaan partikelir yang sama sekali akan dikerjakan atas dasar perjanjian dengan rakyat secara sukarela. Sehingga pada waktu itu, penanaman tebu diserahkan kepada para pengusaha perkebunan swasta Belanda. Dengan demikian campur tangan pemerintah mulai dikurangi dan diusahakan untuk dihentikan sama sekali.

Oleh karena itulah, pada waktu itu banyak didirikan Pabrik-pabrik Gula (PG), terutama di Jawa tengah dan Jawa Timur, oleh para pengusaha perkebunan swasta Belanda tanpa ada lagi campur tangan dari pemerintah Hindia Belanda. (Mubyarto, 1978).

Pada dekade terakhir menjelang pecahnya Perang Dunia I, ditandai oleh kemajuan pesat berbagai perusahaan perkebunan. Laju perkembangan ekonomi menunjukkan konjungtur yang membubung, maka pecahnya Perang Dunia I secara mendadak mengganggu kecenderungan itu. Permintaan akan komoditas-komoditas di pasaran dunia mengalami perubahan, sudah barang tentu disesuaikan dengan kebutuhan perang, yang nyata sekali adalah dampak yang menyangkut

produksi perkebunan yang mengalami penurunan. Situasi perang mengurangi transportasi dan produksi impor, dengan sendirinya persediaan berkurang dan harga naik.

Selo Soemarjan (1981:26) berpendapat bahwa, "Selama bertahun-tahun sebelum Perang Dunia II, industri gula merupakan salah satu industri terpenting di Indonesia, karena dengan adanya industri itu, roda kehidupan ekonomi di Hindia Belanda dapat berubah". Hal ini dikarenakan gula merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok yang penting bagi masyarakat. Ditinjau dari sejarahnya, Industri gula pernah menjadi komponen yang diandalkan dalam sektor ekonomi pemerintahan Hindia Belanda, sehingga kehadirannya hanya berorientasi pada keuntungan finansial. (Ashardikoen, 1978).

Di sisi lain kemakmuran yang diakibatkan oleh industri gula pada tiga dasawarsa permulaan abad ini, mendadak berakhir pada permulaan tahun 1930, dengan terjadinya Krisis Malaise. Krisis ini melanda hampir seluruh bagian dunia, termasuk Hindia Belanda. Krisis ini bermula di Amerika Serikat dimana saat itu Amerika merupakan produsen utama baik sebelum maupun sesudah perang. Hasil produk Amerika Serikat dipasarkan ke Eropa. Akibat politik isolasi yang dijalankan oleh negara totaliter di Eropa, seperti Fasis-Italia, Nazi Hitler, maka barang-barang produksi Amerika Serikat tidak laku, padahal saat itu di Amerika terjadi over produksi. Akibat yang ditimbulkan dari krisis ini adalah terjadinya pengangguran, jatuhnya harga barang-barang ekspor, meningkatnya kejahatan. Menurut Sartono Kartodirdjo (1993:179), "Bagi rakyat di Jawa, Krisis Malaise (yang kemudian lebih dikenal dengan istilah "jaman meleset"), berarti berkurangnya kesempatan kerja, pemotongan gaji, turunnya harga-harga hasil pertanian, rendahnya upah". Sedang menurut William J.O' Malley (1985:85), "Krisis ini juga menggilas gula produksi pulau Jawa di pasaran India dan Cina". Krisis ini juga mempunyai pengaruh terhadap struktur sosial dan ekonomi di Hindia Belanda. Kondisi inilah yang harus ditanggung oleh pemerintah Hindia Belanda yang hanya menggantungkan seluruh kehidupan ekonominya pada satu jenis komoditi yaitu gula.

Setelah jatuhnya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada permulaan tahun 1942, maka kekuasaan Jepang mulai masuk dan mengambil alih semua peninggalan dari pemerintahan sebelumnya, termasuk pabrik gula . Pada masa pemerintahan Jepang ini, banyak pabrik gula yang dibumihanguskan oleh Jepang, karena kebijakan pemerintahan Jepang yang lebih menitikberatkan penanaman komoditi pertanian yang mendukung perang. Selain juga dibumihanguskan oleh para pejuang RI agar tidak jatuh ke tangan Jepang, termasuk juga yang berada di Kabupaten Klaten. Di Klaten terdapat sembilan Pabrik gula (PG) yang sangat menopang kehidupan ekonomi masyarakat Klaten, antara lain : PG. Cokrotulung, PG. Ponggok, PG. Karanganom, PG. Delanggu, PG. Ceper, PG. Gedaren jatinom, PG. Prambanan, PG.Pedan dan PG. Gondangwinangun.

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengadakan peneltian tentang pengaruh Krisis Malaise terhadap PG di Klaten, khususnya di PG. Gondangwinangun dengan dilandasi oleh beberapa alasan yaitu : (a) Di Kabupaten Klaten saat itu banyak berdiri PG yang sangat menopang perekonomian masyarakat Klaten umumnya dan pemerintah kolonial Belanda; (b) Belum adanya penelitian sejenis yang mengkaji tentang dampak adanya Krisis Malaise terhadap keberadaan PG, khususnya di Kabupaten Klaten; (c) Ikut memberi sumbangan bahan penelitian lebih lanjut, khususnya tentang pengaruh Krisis Malaise, agar menjadi salah satu dokumen sejarah bagi daerah Klaten.

Dari paparan diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian tentang pengaruh Krisis Malaise terhadap keberadaan PG di Kabupaten Klaten dengan mengambil judul “ **Pengaruh Krisis Malaise Terhadap Pabrik Gula di Kabupaten Klaten sampai tahun 1942 (Studi Kasus di PG. Gondangwinangun) “.**

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang ada, sekaligus sebagai pembatasan masalah yang akan penulis bahas lebih lanjut, sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah berdirinya PG. Gondangwinangun Klaten ?
2. Bagaimana pengaruh Krisis Malaise terhadap kelangsungan PG. Gondangwinangun ?
3. Bagaimana pengaruh Krisis Malaise bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Klaten ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban tentang :

- 1) Sejarah berdirinya PG. Gondangwinangun Klaten.
- 2) Pengaruh Krisis Malaise terhadap kelangsungan PG. Gondangwinangun Klaten.
- 3) Pengaruh Krisis Malaise bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Klaten.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretik

- 1) Memberi pemahaman tentang sejarah perusahaan perkebunan di Indonesia, terutama perusahaan gula;
- 2) Menambah khasanah pengetahuan tentang pengaruh Krisis Malaise bagi kehidupan PG dan perekonomian di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberi sumbangan bahan penelitian lebih lanjut bagi penelitian tentang pengaruh Krisis Malaise di Indonesia, terutama pada masa penjajahan kolonial Belanda dan bagi masyarakat di bidang ekonomi dan sosial;

- 2) Memberi sumbangan bahan mata kuliah Sejarah Agraria, terutama yang mengkaji tentang pengaruh Krisis Malaise terhadap kelangsungan PG di Indonesia;

- 3) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pendidikan pada Program pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Kolonialisme

a. Pengertian Kolonialisme

Istilah kolonialisme telah lama muncul dan dipakai dalam berbagai pustaka. Dalam uraian ini akan dipaparkan pendapat para ahli yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan.

Dalam *Encyclopedia of the Social Science* (1989:25), kolonialisme diartikan sebagai, "Pembentukan dan pemeliharaan suatu aturan terhadap orang asing untuk waktu yang lama". Kolonialisme ini diidentifikasi dengan aturan terhadap orang-orang yang berbeda ras, berbeda wilayah yang dipisahkan oleh laut dari pusat imperium (kerajaan) dan di bawah kontrol politik langsung oleh negara Eropa. Misalnya, Amerika Serikat atau Australia terhadap ras lain, seperti Asia dan Afrika. Roeslan Abdulgani (1967:7) berpendapat bahwa:

Kolonialisme merupakan suatu rangkaian daja upaja suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain dalam segala lapangan. Dengan demikian kolonialisme merupakan usaha untuk mendominasi politik, eksploitasi ekonomi, dan penetrasi kebudayaan terhadap bangsa lain agar bangsa itu mengikuti sistem yang diterapkan bangsa penjajah.

Menurut *Encyclopedia Soviet Yang Agung* (1953:3), "Kolonialisme merupakan perbudakan ekonomi dan militer terhadap negara-negara tidak bebas". Suhartoyo Hardjosatoto (1985:77) berpendapat bahwa, "Kolonialisme merupakan nafsu untuk

menguasai daerah lain dan bangsa lain". Di samping itu ada pula yang berpendapat bahwa kolonialisme merupakan nafsu suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan dengan jalan dominasi politik, eksploitasi ekonomi dan penetrasi kebudayaan. (Kansil dan Julianto, 1986).

Dewasa ini, kata kolonialisme sering diidentikkan dengan imperialisme, padahal pengidentikkan istilah ini kurang tepat. Menurut Kansil dan Julianto (1986:77), "Kolonialisme merupakan nafsu menguasai daerah lain. Namun usaha selanjutnya yaitu kolonis yang memiliki 8 rupa koloni di daerah lain berusaha menyatukan koloninya menjadi suatu sistem penguasaan, maka usaha ke arah itu disebut imperialisme". Kedua istilah tersebut merupakan suatu rangkaian atau proses.

Balandier dalam *Encyclopedia of the Social Science* (1989:30) menyebutkan beberapa situasi kolonialisme, antara lain :

Dominasi minoritas asing dengan memaksakan superioritas ras dan budaya terhadap mayoritas penduduk asli; Kontak di antara peradaban yang berorientasi pada mesin dan sistem Kristen asli, suatu perekonomian yang berkuasa, ritme kehidupan yang cepat dengan peradaban non-Kristen yang kurang mesin, ditandai oleh perekonomian yang terbelakang dan ritme kehidupan yang lambat; Pembebanan peradaban negara yang berkuasa dengan negara yang dikuasai.

Dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kolonialisme merupakan suatu usaha menaklukkan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain, yang dilakukan dalam berbagai segi, baik segi politik, ekonomi, sosial maupun kebudayaan.

b. Munculnya Kolonialisme

Dalam sejarahnya kolonialisme tidak dapat dipisahkan dengan adanya nasionalisme Eropa. Menurut Roeslan Abdulgani (1967:15) :

Nasionalisme dengan dipengaruhi semangat persaingan besar dari liberalisme dan dibesarkan dalam masyarakat industri kapitalis, tumbuh menjadi aliran yang penuh dengan emosi dan sentimen. Mereka merendahkan bangsa lain serta menguasainya. Sehingga nasionalisme Eropa pada waktu itu melahirkan kolonialisme.

Suhartoyo Hardjosatoto (1985:77) mengatakan bahwa, "Persaingan tidak jarang memunculkan perang satu negara dengan negara lain. Pertikaian di antara kolonis dilanjutkan di wilayah Timur berupa persaingan dalam rangka memperebutkan pusat perdagangan yang strategis". Dengan demikian kolonialisme timbul sebagai kelanjutan persaingan antar negara Eropa, terutama faktor ekonomi.

Sikap terhadap kolonialisme sangat bervariasi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. Seringkali kolonialisme telah diterima sebagai satu manifestasi kebenaran yang pernah ada di mana yang kuat mendominasi yang lemah. Aturan kolonial seringkali di dasarkan pada hak penakluk, yang didukung oleh klaim superioritas ras. Jika kepentingan orang yang ditaklukkan itu diperhitungkan maka diperlukan satu pengarahan (bimbingan) yang lama untuk membuat mereka mampu berdiri sendiri di bawah kondisi dunia modern. Menurut Roeslan Abdulgani (1967:20), "Kolonialisme diperlukan untuk mempertahankan aturan asing pada daerah koloni sebab hal itu dapat memudahkan terjadinya transisi peradaban pada tahap perbaikan yang lebih tinggi". Rord Bugard (1922) memperkenalkan elemen lain dalam mengajukan tentang pertahanan kolonialisme, di mana dia mengatakan kekuatan koloni itu berada di bawah mandat ganda yang membebani mereka untuk memastikan atau menjaga kelanjutan perkembangan dunia umumnya. Dari pendapat Rord Bugard ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa aturan kolonial dapat diterima jika penguasa dapat mempersiapkan kemerdekaan bagi daerah koloni, namun ternyata di kalangan rakyat muncul sikap skeptis terhadap penguasa yang kemudian melahirkan suatu desakan agar mereka menerima saja pengawasan dari pengawas internasional dan mengangkat semua daerah yang tidak mempunyai pemerintahan sendiri ke dalam domain politik internasional.

c. Praktek Kolonialisme

Kolonialisme pada dasarnya bergerak pada tiga bidang yaitu ekonomi, politik dan kebudayaan. Dalam tiga bidang tersebut, kepribadian penduduk pribumi dihancurkan. Menurut Suhartoyo Hardjosatoto (1985), pelaksanaan

kolonialisme sedikit banyak tergantung pada kondisi negara penjajah. Selanjutnya Suhartoyo Hardjosatoto membagi empat tipe negara penjajah berdasarkan perbedaan mengenai kekayaan alam atau kemajuan teknologi dan sistem produksi barang yang merupakan faktor obyektif dari negara penjajah, yaitu :

1. Penjajah yang kaya dan royal

Tipe ini dapat diartikan tanah air penjajah kaya akan barang tambang dan industrinya maju, sehingga begitu banyak menghisap kekayaan alam atau tenaga dari bangsa yang dijajah. Bangsa yang dijajah diberi bantuan pendidikan sehingga merasa berhutang budi kepada negara penjajah. Contoh, Amerika di Philipina.

2. Penjajah yang semi kaya

Tipe ini merupakan penjajah yang tanah airnya meskipun tidak banyak mengandung bahan tambang tertentu, persediaan yang ada sudah dapat digunakan sebagai landasan bagi majunya industri. Negara ini memerlukan daerah pasaran bagi tempat menjual hasil industrinya. Untuk meningkatkan daya beli rakyat jajahan, maka diselenggarakan peningkatan taraf pendidikan rakyat jajahan. Penjajah ini sedikit banyak masih memerlukan beberapa komoditas dari negara jajahan. Contoh, Inggris di India.

3. Penjajah yang miskin

Tipe ini merupakan penjajah di mana industrinya telah maju tetapi tanah airnya tidak banyak menghasilkan bahan baku bagi industrinya. Bahan baku didatangkan dari luar negeri, terutama sekali daerah jajahan. Mereka secara intensif mengeksploitasi daerah jajahan untuk persediaan bahan baku bagi industrinya. Contohnya, Belanda di Indonesia.

4. Penjajah yang sangat miskin

Tipe ini merupakan penjajah yang negerinya tergolong miskin akan bahan tambang dan tanahnya tidak subur, sehingga keperluan rakyat didatangkan dari luar negeri. Penjajah seperti ini sangat menekan dan menghisap negeri dan penduduk yang dijajahnya. Contoh, Portugis yang menjajah Timor-timur.

Selain tipe – tipe di atas, kolonialisme juga bisa terwujud dari dibukanya perkebunan-perkebunan oleh pemerintah kolonial yang kemudian diikuti oleh didirikannya perusahaan-perusahaan perkebunan guna mengolah

hasil-hasil dari perkebunan itu. Seperti yang ada di Klaten, di mana saat itu didirikan pabrik-pabrik gula (PG) yang mengolah tebu menjadi gula. Hal ini merupakan wujud dari prinsip eksploitasi ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Dengan demikian dapat dimaklumi bila corak penjajah menentukan sifat dan perlakuan terhadap tanah air maupun bangsa yang dijajahnya. Oleh karena itu praktek kolonialisme amat berlainan, namun demikian ada persamaan pada awal kedatangannya. Para Kolonis yang datang pertama kali di daerah Asia dan daerah lainnya mengadakan kontak dagang dengan penduduk pribumi. Perdagangan tersebut membawa keuntungan yang besar, sehingga menarik bangsa Eropa yang lain untuk ikut berdagang, misalnya Belanda, Inggris, Perancis, dan sebagainya. Setelah mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerah, maka timbullah niat untuk menguasai daerah yang potensial. Mereka mulai mendesak pedagang pribumi secara perlahan-lahan. Posisi pedagang pribumi secara perlahan-lahan tergeser dan peranannya menurun. Walaupun pedagang pribumi banyak, namun mereka tidak terorganisir. Menurut Roeslan Abdulgani (1967: 11), "Setelah pedagang pribumi terdesak maka kolonis Eropa mulai menaklukkan para Radja dan Sultan yang berkuasa pada waktu itu". Selanjutnya Roeslan Abdulgani menambahkan :

Mereka memulai fase baru jaitu ikut tjampur dalam masalah intern suatu keradjaan. Lambat laun dengan kekuasaan politik jang diperoleh, usaha kolonis untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangannya lebih teratur dan terentjana. Dengan demikian eksploitasi ekonomi dimulai dan lapisan masjarakat ini diinfiltrasi dengan nilai-nilai kebudajaan.

d. Pihak yang terkait dalam kolonialisme

Sebagai suatu usaha untuk menguasai suatu wilayah, maka dalam kolonialisme terdapat pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan cita-cita menguasai wilayah itu. Menurut Soeharjo Hatmosoepobo (1995: 55), "Pihak yang terkait dalam kolonialisme terdiri dari pihak kolonis dan penguasa lokal". Lebih lanjut dia mengatakan :

Politik kolonial Belanda sampai kurang lebih tahun 1870 konsisiten dengan anggapan umum di negeri Belanda bahwa tanah koloni, khususnya Jawa, adalah produsen komoditi agraris untuk ekspor. Oleh karena itu untuk mewujudkan cita-cita menguasai Jawa, maka pihak

kolonis mengadakan pendekatan dengan penguasa lokal, dalam hal ini bupati, untuk membantu usaha itu. Tentu saja dengan satu kompensasi bahwa kekuasaan mereka akan aman.

Oleh karena itu pada masa VOC, dalam rangka menciptakan produksi yang besar-besaran hanya dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja yang besar, yang dikerahkan dari desa oleh bupati. Hal ini karena adanya ikatan desa dan ikatan feodal yang kuat antara rakyat dengan penguasa lokal. Sebagai kompensasi dari kerjasama dengan penguasa lokal (bupati), maka pemerintahan tradisional tidak diganggu.

Selain pihak kolonis dan penguasa lokal, pihak lain yang juga terkait dalam kolonialisme adalah para pengusaha swasta Belanda. Seperti yang diutarakan oleh Uemura Yasuo (1985: 25):

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Gula atau *Suiker Wet*, di mana penanaman tebu secara paksa mulai berangsur-angsur dihilangkan, maka mulai muncul perusahaan gula yang didirikan oleh para pengusaha swasta Belanda. Mereka mendirikan pabrik gula di daerah-daerah yang kaya akan sumber alam (untuk penanaman tebu). Tujuan dari pendirian pabrik gula ini adalah untuk mengeksploitir sumber alam Indonesia yang kaya akan sumber bahan alam.

Salah satu diantaranya adalah di Klaten, di mana saat itu didirikan lebih kurang sembilan pabrik gula, termasuk Pabrik Gula Gondangwinangun yang didirikan pada tahun 1860, oleh suatu badan yang bernama *NV. Klatensche Cultuur Maatschapij* yang berkedudukan di Semarang.

e. Cara pengendalian daerah kolonial

Dalam mengendalikan daerah koloni, pihak kolonis menempuh beberapa cara. Salah satu cara yang ditempuh, menurut Soeharjo Hatmosoeprobo (1995: 55) adalah dengan “menempatkan pemerintahan kolonial di daerah jajahan”.

Lebih lanjut dia mengatakan :

Di Jawa yang kaya akan komoditi agraris untuk ekspor, maka perlu dieksploitasi sebanyak-banyaknya dan semurah – mudahnya. Untuk tujuan itu di tanah koloni harus ada pemerintahan Eropa yang efisien dan terkontrol di samping pemerintahan bumiputera. Di Jawa pemerintahan bumiputera itu dikepalai oleh seorang bupati. Kedudukan bupati ini tetap

dipertahankan, karena kekuasaan atas rakyatnya yang otoriter namun berwibawa, masih diperlukan.

Dasar pemerintahan kolonial yang pertama dibentuk oleh Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811), dengan membentuk pemerintahan Eropa yang rasional dan terkontrol, di samping korps pemerintahan pribumi yang teratur, yang semula merupakan kelompok yang heterogen. (Soeharjo Hatmosoeprobo, 1995). Pemerintahan tradisional tetap dipertahankan oleh penguasa kolonial karena adanya hubungan yang bersifat *historis-dinastik* antara penguasa tradisional, yaitu bupati, dengan rakyat di wilayahnya yang sangat kuat. Karena menurut kepercayaan rakyat, bupati sebagai kepala keluarga, priyayi dan juga kepala pemerintah, mewarisi wahyu memegang tampuk pemerintahan. Oleh penguasa kolonial, kedudukan penguasa tradisional ini dijadikan tiang penyangga kekuasaannya.

Usaha lain yang ditempuh oleh pemerintah kolonial dalam rangka mengendalikan daerah kolonial adalah mengadakan reorganisasi pemerintahan. Menurut Soeharjo Hatmosoeprobo (1995: 56), "Reorganisasi ini dilakukan sebab pada waktu itu, *cultuurstelsel* mulai berangsur-angsur dihapus dan diteruskan pengusaha-pengusaha swasta Barat, terutama pengusaha Belanda". Lebih lanjut dia mengatakan :

Pengusaha-pengusaha swasta ini menggunakan tenaga upahan dan tanah sewaan. Ini berarti tugas ekonomi pemerintah, khususnya bupati, juga mulai berangsur-angsur berkurang. Perusahaan swasta Barat, yang berskala besar, mulai bermunculan. Sementara itu jumlah penduduk bertambah, karena kondisi kehidupan dan kesehatan menjadi lebih baik, kalau pada permulaan abad ke-19 (lebih kurang tahun 1802) jumlah penduduk Jawa diperkirakan lebih kurang 3,6 juta, pada tahun 1850 jumlahnya sudah menjadi 9 juta. Pada tahun 1860 bertambah menjadi 12 juta lebih. Angka-angka tersebut menunjukkan jumlah penduduk Jawa meningkat pesat jika dibandingkan dengan abad-abad yang lalu. Dengan reorganisasi itu pemerintah kolonial berusaha mengantisipasi keadaan baru itu, antara lain memperkuat kedudukannya.

Menurut Sartono Kartodirdjo (1987), suatu langkah penting dalam proses pelembagaan pangreh praja dilakukan dengan penyusunan hirarki bagian Eropa

dan sejajar dengan itu pembagian wilayah-wilayahnya. Lebih lanjut Sartono Kartodirdjo (1987:342) menambahkan :

Antara tahun 1830 dan 1870 jumlah Asisten Residen (AR) sudah berlipat dua, dari 30 menjadi 60. Mereka mempunyai daerah di bawahnya yaitu *afdeling*, sebagai bagian dari suatu karesidenan (*residentie*) di bawah seorang residen. Seorang AR dibantu oleh seorang kontrolir (*controleur*), seorang pejabat yang dalam prakteknya ternyata mempunyai kesempatan langsung berhubungan dengan rakyat di pedesaan. Pembagian wilayah tersebut dijalankan sejak tahun 1874 oleh Van de Putte. Di samping itu bentuknya kecamatan (*subdistric*) sebagai bagian dari kawedanan (*distric*) yang membawahi lima belas desa.

Reorganisasi pemerintahan dilakukan baik terhadap pemerintahan Eropa maupun pemerintahan bumiputera. Menurut Soeharjo Hatmosoeprobo (1995: 7) :

Aparatur pemerintahan Eropa jumlahnya ditambah. Residen ditambah dari 21 orang menjadi 24 orang; asisten residen dari 45 orang menjadi 60 orang. Jumlah kontrolir seluruhnya 100 orang. Ini berarti anggaran belanja pemerintah bertambah besar, tetapi penambahan ini menjadikan jumlah pemerintahan Eropa dianggap berimbang dengan pemerintahan bumiputera.

Kondisi ini berdampak semakin besarnya pengaruh kekuasaan pemerintah Belanda di daerah pedalaman Jawa. Di setiap kabupaten ditempatkan seorang asisten residen, sehingga pengawasan pemerintah kolonial terhadap pemerintahan bumiputera makin efisien.

f. **Akibat Kolonialisme**

Pelaksanaan kolonialisme secara umum membawa suatu dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat daerah koloni. Akibat kolonialisme menurut Roeslan Abdulgani (1967: 61) ialah, "Hampir semua negara Asia pada abad ke-18 dan 19 kehilangan kemerdekaan politik dan kebebasan ekonominya. Juga di lapangan kebudayaan nampak pengaruh yang merugikan". Pelaksanaan kolonialisme di Indonesia menurut Kansil dan Julianto (1986), tampak dari ciri-ciri pokok imperialisme Belanda yaitu :

1. Membeda-bedakan warna kulit;
2. Menjadikan tanah jajahan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara induk;

3. Perbaiki sosial sedikit; dan

4. Jarak sosial yang jauh antara bangsa penjajah dengan bangsa terjajah.

Suatu masyarakat kolonial seperti yang diutarakan oleh Satono Kartodirdjo (1990: 12),” Memiliki ciri adanya pembatasan-pembatasan dalam pergaulan sosial”.

Lebih lanjut Sartono Kartodirdjo mengatakan :

Masyarakat kolonial terbagi atas penjajah dan terjajah. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak ada kontak sosial dan terjadi pemisahan fisik secara mencolok antara penjajah dan terjajah. Tampak jelas dari kalangan pribumi dilarang keras memasuki berbagai perkumpulan lapangan olah raga dan daerah tempat tinggal orang Belanda. Orang Eropa di kota memiliki daerah tempat tinggal khusus yang tentunya di bagian kota yang baik.

Masyarakat kolonial dengan dua kekuatan yang berlawanan kepentingan, memunculkan konflik yang tetap dalam berbagai segi kehidupan. Adanya diskriminasi memperkuat konflik yang ada. Situasi kolonial tersebut merupakan tantangan bagi rakyat di daerah jajahan untuk berusaha mempertahankan diri dan untuk mengubah situasi yang ada.

Menghadapi situasi yang demikian, bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Sehingga kemudian memunculkan perlawanan di berbagai tempat, misalnya perlawanan Sultan Agung, Diponegoro, Aceh dan sebagainya. Adanya perlawanan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak dapat ditundukkan sepenuhnya oleh bangsa lain. Menurut Kansil dan Julianto (1986: 9),”Pada dasarnya perlawanan bangsa Indonesia dan Asia lainnya dilakukan dengan cara perlawanan *Zelotisme*, yaitu dengan menolak segala pengaruh asing dengan mengisolasi diri. Disamping itu juga *Herodianisme*, yaitu menentang dengan mengoper segala cara Barat dan menggunakannya untuk memperkuat diri”. Adanya perlawanan di berbagai daerah, ternyata tidak didiamkan pemerintah Belanda. Mereka berusaha menumpas perlawanan secepat mungkin. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno (1964: 24),”Semua keadaan dalam negeri djadjahan, jang bertentangan dengan kepentingannya pihak pendjajah, segera mendapat perlawanan daripadanya”.

2. Perkebunan

a. Definisi Perkebunan

Apabila mendengar kata perkebunan, maka imajinasi yang akan muncul dalam pikiran adalah suatu penanaman yang dilakukan dengan banyak tanaman dan bermacam-macam jenis. Secara spesifik istilah perkebunan akan diuraikan lebih lanjut yang kemudian akan diambil satu kesimpulan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 458), perkebunan berhubungan dengan hal ‘berkebun’, ‘perusahaan yang mengusahakan kebun-kebun’ dan ‘tanah-tanah yang dijadikan kebun’. Selanjutnya menurut Peter Salim dan Yenny Salim (1991: 680), Perkebunan berhubungan dengan ‘hal yang berkenaan dengan kebun’ dan ‘perusahaan kebun’. Dari dua pendapat di atas, memiliki kesamaan pendapat bahwa perkebunan adalah sesuatu yang berhubungan dengan tanah, kebun dan perusahaan yang mengusahakannya. Namun dalam konteks ini, perkebunan diartikan sebagai perusahaan yang mengusahakan kebun-kebun.

Dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/97, tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, Usaha Perkebunan diartikan sebagai:

Kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau usaha industri perkebunan dalam bentuk perkebunan rakyat yang diusahakan oleh perseorangan di atas tanah hak milik atau hak guna dan perusahaan perkebunan yang dilakukan di atas lahan hak guna mulai dari pembibitan, penanaman, pengolahan hasil sampai pemasarannya. (Departemen Pertanian, dalam www.deptan.go.id/kpts).

Menurut William J.O’Malley (1988: 198), “Perkebunan sebagai suatu komponen yang terdiri atas tanah, pekerja, modal, teknologi, skala, organisasi dan tujuan”.

Lebih lanjut William J.O’Malley menambahkan :

Di dalam sistem perkebunan, semua faktor ini mungkin saja berbeda-beda, baik sepanjang masa maupun pada kurun waktu tertentu. Lahan perkebunan, misalnya, dapat disewa selama jangka waktu panjang dari pemerintah, dari kesatuan-kesatuan pemerintah lokal yang mandiri, atau dari pihak lain yang berhak atas lahan tersebut.

Sementara Boeke (1948), memberikan definisi perkebunan dengan lebih menekankan pada aspek teknis dan efisiensi, dan hampir tanpa memperhitungkan

penyediaan tenaga kerja atau masyarakat di sekitarnya. Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991: 4) mengemukakan:

Sistem perkebunan diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian berskala besar dan kompleks, bersifat padat modal (*capital intensive*), penggunaan areal pertanian luas, organisasi tenaga kerja upahan (*wage labour*), struktur hubungan kerja yang rapi, dan penggunaan teknologi modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman komersial (*commercial crops*) yang ditujukan untuk komoditi ekspor di pasaran dunia.

Dalam pengelolaan suatu perkebunan, terdapat berbagai unsur yang terlibat. Menurut Yayasan Agroekonomi (1983: 31), "dalam suatu perkebunan, terdapat unsur pemerintah, swasta dan rakyat, yang bekerja sama dalam mengolah perkebunan untuk menghasilkan suatu hasil yang sama dan untuk memenuhi kebutuhan bersama". Dari beberapa pendapat di atas maka dapat diambil satu kesimpulan bahwa perkebunan adalah suatu sistem kerja dalam suatu kegiatan pertanian dimana terdiri dari berbagai komponen, yaitu pemerintah, swasta, rakyat, tanah, pekerja, modal teknologi, organisasi, dan tujuan, yang saling berhubungan dan berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai suatu tujuan atau hasil bersama.

b. Awal Pertumbuhan Perkebunan

Sebelum mengenal sistem perkebunan dari Barat, masyarakat agraris di negara-negara berkembang mengenal sistem kebun sebagai bagian dari sistem perekonomian pertanian tradisional. Dalam struktur ekonomi pertanian tradisional, usaha kebun sering merupakan pelengkap atau tambahan dari kegiatan kehidupan pertanian pokok, terutama pertanian pangan secara keseluruhan. Sistem kebun biasanya diwujudkan dalam bentuk usaha kecil, tidak padat modal, penggunaan modal terbatas, sumber tenaga kerja berpusat pada anggota keluarga, kurang berorientasi pada pasar, dan lebih berorientasi pada kebutuhan *subsisten*. Ciri pokok sistem kebun semacam sekaligus menjelaskan ciri umum dari usaha pertanian masyarakat agraris yang masih "*subsisten*" dan pra-kapitalistik atau pra-industrial.

Menurut Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991), sebelum masuknya sistem pertanian dari Barat, masyarakat di kepulauan Nusantara secara bertahap telah mengembangkan dua tipe kegiatan pertanian, yaitu kegiatan pertanian yang menggarap tanaman subsisten dan yang menggarap tanaman perdagangan (*commercial crops*). Lebih lanjut Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991:15) menguraikan :

Dari berbagai ragam kegiatan pertanian itu, terdapat empat sistem pertanian yang telah lama dikenal di daerah Indonesia. Keempat sistem itu, ialah (1) sistem perladangan (*shifting cultivation*), yaitu jenis kegiatan pertanian yang dilakukan secara berpindah-pindah, dengan penanaman berbagai tanaman berumur pendek, terutama tanaman pangan ; (2) sistem persawahan (*wet rice cultivation system*); (3) sistem kebun (*garden system*), yaitu kegiatan pertanian yang menggarap tanaman (perdu) berusia panjang (*perennial*) atau tanaman penghasil panen (*crops*) yang ditanam pada lahan tetap; dan (4) sistem tegalan (*dry field*), yaitu tipe kegiatan penanaman tanaman pangan (*food crops*) secara tetap pada daerah lahan kering.

Sistem perkebunan mulai masuk bersamaan dengan masuknya pengaruh dari Barat. Sistem ini merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian komersial dan kapitalistik. Kehadirannya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada umumnya berhubungan erat dengan proses kolonialisme dan modernisasi, karena itu hubungan sejarah perkebunan dengan sejarah kolonialisme sangat erat. Sistem perkebunan dipandang sebagai cara yang tepat untuk diterapkan di negara-negara berkembang, karena di daerah itu memiliki tanah dan tenaga kerja murah yang melimpah, sehingga memungkinkan untuk dieksploitasi hasil kekayaannya untuk dijual di pasaran dunia. Di Jawa yang sangat subur tanahnya dan memiliki sumber daya alam yang melimpah serta tenaga kerja yang banyak dan murah, sangat potensial untuk mengembangkan sektor perkebunan. Hal ini kemudian menarik niat para kolonis Barat untuk membuka perkebunan-perkebunan yang menanam tanaman yang memang sangat laku di pasaran dunia pada saat itu, misalnya tebu, kopi, nila dan lain-lain.

c. Macam-macam Perkebunan

Pada masa kolonial, di wilayah nusantara khususnya Jawa, banyak dibuka perkebunan-perkebunan oleh para pengusaha swasta barat, terutama dari Belanda. Hal ini merupakan akibat dari dikeluarkannya Undang-undang Agraria (*Agrarisch Wet*) tahun 1870. Menurut Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991:80), “Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang peraturan tataguna tanah”. Lebih lanjut Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo mengatakan:

Undang-undang ini berisi ketentuan-ketentuan tentang tataguna tanah antara lain:

- (1) Tanah milik rakyat tidak dapat dijualbelikan kepada non-pribumi.
- (2) Di samping itu tanah domain pemerintah sampai seluas 10 *bau* dapat dibeli oleh non-pribumi untuk keperluan bangunan perusahaan.
- (3) Untuk tanah domain lebih luas ada kesempatan bagi non-pribumi memiliki hak guna tanah, ialah:
 - (a) sebagai tanah dan hak membangun (*recht van opstal*, disingkat RVO);
 - (b) tanah sebagai *erfpacht* (hak sewa serta hak mewariskan) untuk jangka waktu 75 tahun.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Agraria, satu alat produksi pokok ialah tanah telah diliberalisasikan, maka terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk membuka perusahaan perkebunan.

Macam-macam perkebunan yang dibuka di Jawa pada waktu pemerintahan kolonial Belanda menurut William J.O'Malley (1988) di antaranya adalah:

1. Perkebunan tebu; yang akan menghasilkan gula sebagai komoditi yang sangat laku di pasaran dunia. Industri gula merupakan industri yang menguntungkan, terkemuka, dan dalam beberapa segi merupakan industri teladan bahkan membantu mencetuskan terjadinya *boom*-ekspor dari tanam paksa pada tahun 1830-an.
2. Perkebunan Kopi; yang dihasilkan barang dagang berupa kopi, merupakan barang dagangan yang sangat menguntungkan dari sistem Tanam paksa. Seperti halnya gula, kopi ditanam oleh petani-petani bumiputera pulau Jawa di bawah paksaan pemerintah Hindia Belanda. Penanaman kopi

tersebar mulai dari Banten, Karawang, Priangan, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Probolinggo, Banyuwangi dan Madiun.

3. Perkebunan Nila; Nila merupakan hasil tanaman yang sangat penting pada permulaan masa tanam paksa, namun dalam perkembangannya, nila tidak begitu disukai oleh para pengusaha perkebunan Barat sehingga dihentikan penanamannya.

d. Perkebunan dan Kolonialisme

Berbicara tentang sejarah perkebunan tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme. Kolonialisme yang terwujud dalam tiga aspek, yaitu dominasi politik, penetrasi kebudayaan, dan eksploitasi ekonomi. Tiga aspek itu merupakan usaha yang dilakukan penjajah untuk menguasai, mempengaruhi serta mengambil semua yang ada di tanah jajahan. Perkebunan merupakan salah satu penerapan dari aspek eksploitasi ekonomi. Di negara-negara berkembang, pada umumnya perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari perkembangan kapitalisme Barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991).

Dibukanya perkebunan oleh pihak kolonial, pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari kapitalisme perkebunan. Menurut Suhardi (2000), kapitalisme perkebunan merupakan sebuah usaha penguasaan dan pendayagunaan ekonomi petani yang dilakukan secara sistematis, terorganisir secara rapi, dan memiliki jaringan pasar yang amat luas. Cara ini dilakukan dengan menggunakan dukungan politik pemerintahan bekerjasama dengan penguasa setempat. Bentuk dari kapitalisme perkebunan di daerah-daerah jajahan diwujudkan melalui perluasan areal tanaman ekspor dengan menyertakan petani setempat sebagai tenaga buruh murah.

Perkebunan merupakan tulang punggung ekonomi kolonial yang ‘liberal kapitalistik’, karena mampu menghasilkan aneka komoditi ekspor yang dibutuhkan pasaran dunia, seperti gula, teh, kopi. Menurut Mubyarto (1991), negara-negara Eropa yang merupakan kekuatan kolonial besar seperti Inggris, Belanda, Portugis dan Spanyol, berusaha untuk menguasai daerah-daerah jajahan di Asia, Amerika Selatan dan Afrika untuk menghasilkan karet, gula, kelapa

sawit, kopi, teh. Hal ini bisa dicapai dengan membuka perkebunan yang menanam tanaman yang diinginkan pihak kolonial. Bahkan di Amerika Serikat bagian selatan, merupakan pusat perkebunan kapas dan gula yang untuk “mempertahkannya”, telah mengakibatkan “perang budak” (1861-1865), perang saudara terbesar dalam sejarah Amerika.

Perkebunan di daerah-daerah jajahan pada umumnya hadir bersamaan dengan masuknya kekuasaan asing yang salah satu tujuannya adalah untuk mengeksploitir sumber alam tanah jajahan yang sangat subur. Di bawah ini akan diberikan gambaran tentang masuknya usaha perkebunan di beberapa negara yang bersamaan dengan proses kolonisasi. Sebagai contoh adalah di Kuba. Menurut Sigit Susanto dalam www.geocities.com/apii-berlin/aktual/sosialisme_kuba.html, pada saat bangsa Spanyol datang ke Kuba tahun 1512, mereka melihat ada potensi yang bisa dikembangkan untuk pengembangan perkebunan. Akhirnya pada tahun 1548 dimulai penanaman tebu yang didatangkan dari Guinea (Afrika) hanya kurang dari 60 tahun setelah pulau itu ditemukan. Bangsa Spanyol banyak mendatangkan budak dari Afrika untuk menanam dan mengolah tanaman tebu. Kondisi ini mengakibatkan penduduk asli (Indian) mulai terdesak. Dengan hadirnya perkebunan tebu di Kuba dan didatangkannya budak dari Afrika, maka Kuba menjadi pusat gula di Karibia, bahkan pada tahun 1800, gula menjadi sumber *income* terpenting bagi Spanyol yang dihasilkan dari perkebunan tebu di Kuba.

Menurut Kedutaan Besar Indonesia di Suriname dalam www.aksaranesia.sr/html/03rahsur.html, perkebunan tebu di Suriname berawal saat masuknya kekuasaan Belanda di negara itu (tahun 1530), namun saat itu perkebunan tebu yang diusahakan oleh bangsa Belanda kurang berkembang, akibat dihapuskannya perbudakan pada tanggal 1 Juli 1863. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda menanda tangani sebuah perjanjian dengan Inggris untuk mendatangkan imigran asing ke Suriname. Perjanjian ini diimplementasikan secara resmi pada tahun 1873 sampai 1914, di mana rombongan imigran yang pertama masuk adalah dari India, kemudian pada tahun 1890, masuk imigran yang datang dari Jawa. Mereka itulah yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan

tebu yang dikelola oleh pemerintah Belanda bersama Inggris. Oleh karena itu wajar bila saat ini di Suriname banyak keturunan Jawa dan bahkan menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Di wilayah Asia Selatan, seperti India, juga dibuka perkebunan yang lain yaitu Teh. Menurut www.sosro.id/ror/html, perkebunan teh di India mulai dibuka saat kedatangan bangsa Inggris. Perkebunan teh pertama kali dibuka di daerah Assam dan bahkan daerah ini menjadi daerah penghasil teh yang terkenal di dunia. Di Indonesia, perkebunan mulai muncul ketika masuknya bangsa Belanda. Menurut Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), dalam www.bapepam.go.id/profil/sejarah, sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Macam-macam perkebunan yang dibuka saat itu adalah teh, tebu, kopi dan kina. Pemerintah kolonial Belanda banyak menggunakan tenaga rakyat untuk membuka, mengolah dan merawat perkebunan-perkebunan itu. Para petani saat itu dipaksa untuk menanam tanaman ekspor seperti gula, kopi, teh di antara tanaman pangan yang ditanam di atas tanah milik bersama (umumnya hutan). Sebagai contoh dataran tinggi Pengalengan di antara Gunung Malabar, Gunung Tilu dan Gunung Wayang, banyak dibuka untuk perkebunan kopi dan teh. (WWF dalam www.langsing.net/gunung/artikel/hutan.html).

Hadirnya perkebunan di tanah jajahan tidak terlepas dari adanya politik kolonial yang dijalankan penjajah. Menurut Djoko Suryo (1986), pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, ada dua aliran yang sangat berpengaruh dalam proses intensifikasi sistem pemerintahan kolonial dan penetrasi ekonomi kapitalis Barat di tanah jajahan, yaitu aliran politik kolonial konservatif dan liberal. Lebih lanjut Djoko Suryo (1986:30) menguraikan :

Kedua aliran itu, konservatif dan liberal, berbeda dalam merumuskan sistem kebijaksanaan politik dalam menggali tanah jajahan. Haluan politik yang pertama cenderung mengutamakan negara sebagai penanggung jawab penggalian sumber perekonomian tanah jajahan di samping sebagai pengelola administrasi pemerintahan negara. Di pihak yang lain haluan yang kedua, yaitu aliran liberal, menghendaki pemisahan tegas antara sektor pemerintahan dan sektor perekonomian. Menurut aliran ini negara perlu membatasi diri dalam sektor administrasi pemerintahan negara, sedangkan sektor penggalian sumber perekonomian perlu diserahkan kepada swasta. Hal ini kemudian

diwujudkan dengan dibukanya perkebunan-perkebunan oleh pengusaha-pengusaha swasta Barat.

Saat itu di negeri Belanda, terjadi pergantian pemerintahan dari golongan konservatif ke golongan liberal. Menurut Sartono Kartodirdjo dan Joko Suryo (1991), perpindahan politik pemerintahan ini ditandai dengan kebangkrutan VOC. Lebih lanjut Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991: 41) menambahkan:

Kebangkrutan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yaitu kecurangan pembukuan, korupsi, pegawai yang lemah, sistem monopoli dan penderitaan penduduk. Pada masa yang sama Negeri Belanda juga sedang mengalami akibat buruk dari perang menghadapi Inggris dalam memperebutkan penguasaan perdagangan.

Menurut Abdul Kadir Ismail dalam www.ppp.or.id/pidato2.html, Sejarah perkebunan swasta di Indonesia dimulai pada tahun 1870 dengan diumumkannya Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*). UU tersebut dikeluarkan dengan maksud mengundang modal swasta beroperasi di Indonesia untuk mengembangkan produk-produk pertanian yang banyak diminta di pasar dunia terutama pasar eropa, seperti gula, kopi, karet, dan tembakau. Sebelum tahun 1870 sistem perkebunan dilaksanakan melalui sistem Tanam Paksa. Sementara itu, perkebunan swasta di luar pulau Jawa, pembukaannya dimulai di Sumatera Timur pada tahun 1864. Demikian juga yang terjadi di Suriname, yang saat itu juga di bawah penjajahan Belanda. Menurut Kedutaan Besar Indonesia di Suriname dalam www.aksaranesia.sr/html/03rahsur.html, bahwa pada masa kekuasaan Belanda di Suriname, kebijaksanaan yang dijalankan khususnya dalam bidang perekonomian adalah berupa pembukaan perkebunan-perkebunan yang menanam tanaman ekspor. Hal ini sebagai hasil perjuangan kaum liberal di Belanda yang menginginkan adanya perubahan kebijaksanaan politik di tanah jajahan. Pembukaan perkebunan-perkebunan di Suriname juga sebagai upaya pemerintah kolonial Belanda untuk mengatasi kekosongan kas negara. Sedangkan yang terjadi di Kuba pada prinsipnya sama seperti yang terjadi di Indonesia dan Suriname. Menurut Sigit Susanto dalam www.geocities.com/apii-berlin/aktual/sosialisme_kuba.html, kebijaksanaan yang diambil pemerintah Spanyol di tanah jajahan, dalam hal ini Kuba, yaitu berusaha mengambil kekayaan

alam tanah jajahan yang diwujudkan dalam pembukaan perkebunan tebu, kopi dan yang lainnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa negara induk tidak memiliki sumber kekayaan alam yang sangat vital bagi penduduknya.

Untuk mengerjakan perkebunan dibutuhkan banyak pekerja. Untuk bisa menggerakkan pekerja yang besar itu, pemerintah kolonial memanfaatkan para penguasa pribumi untuk menggerakkan rakyat mengerjakan perkebunan. Di Indonesia, khususnya Jawa, tenaga rakyat ini bisa digerakkan melalui perantara penguasa lokal, seperti Bupati. Menurut Wertheim (1978), dalam pelaksanaan perkebunan di daerah jajahan, dilakukan dengan cara memanfaatkan pengaruh kekuasaan elit tradisional Jawa dengan maksud akan memudahkan dalam proses eksploitasi petani. Hal ini karena struktur agraris di Indonesia pada umumnya dan di Jawa khususnya masih serba terikat pada struktur tradisional dan feodal. (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991). Para penguasa pribumi bertugas langsung memobilisasi rakyat dalam hal keperluan pelaksanaan penanaman tanaman. Pihak kolonial memberikan suatu perangsang agar para penguasa pribumi itu dapat melaksanakan tugas dengan baik. Perangsang yang dimaksud menurut Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991) adalah dalam bentuk perangsang finansial yang disebut *Cultuurprocenten* (prosenan tanaman). *Cultuurprocenten* itu berupa persentase tertentu dari penghasilan yang diperoleh dari penjualan tanaman ekspor yang diserahkan oleh para penguasa tersebut, jika mampu melampaui target produksi yang telah ditentukan pada setiap desa.

Perangsang yang dilaksanakan di Suriname, agak berbeda dengan yang dilaksanakan di Indonesia, karena pemerintah kolonial Belanda tidak mengadakan pendekatan terhadap penguasa setempat dalam rangka memobilisasi tenaga kerja yang akan bekerja di perkebunan milik Belanda. Menurut Kedutaan Besar Indonesia di Suriname dalam www.aksaranesia.sr/html/03rahsur.html, tenaga yang digunakan untuk mengolah perkebunan didatangkan dari luar Suriname yang biasa disebut imigran. Hal ini sebagai hasil perjanjian antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Inggris tahun 1870, yang menegaskan bahwa perbudakan di Suriname dihapuskan dan diganti dengan mendatangkan tenaga dari luar. Imigran yang didatangkan pertama kali adalah dari imigran India yang datang mulai tahun

1873 sampai 1914. Kelompok imigran yang selanjutnya adalah dari Jawa pada tahun 1890. Mereka dipekerjakan di perkebunan-perkebunan milik Belanda hingga mereka berkeluarga dan memiliki keturunan.

Di daerah perkebunan milik Spanyol di Kuba tenaga kerja yang digunakan adalah para budak yang didatangkan dari Afrika. Menurut Sigit Susanto, dalam www.geocities.com/apii-berlin/aktual/sosialisme_kuba.html, saat itu di Kuba terdapat 30.000 budak guna dipekerjakan di perkebunan..

Dari beberapa contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa usaha perkebunan tidak bisa dilepaskan dari kolonialisme, khususnya adalah aspek eksploitasi. Hal ini disebabkan karena negara jajahan memiliki tanah yang subur serta tenaga yang murah sehingga sangat potensial untuk dikembangkannya sektor perkebunan sebagai salah satu upaya untuk mengambil hasil alam dari negara jajahan.

e. Perkebunan Masa Kolonial

Apabila berbicara tentang sejarah perkembangan perkebunan di negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. Di negara-negara berkembang, pada umumnya perkebunan hadir sebagai perpanjangan dari sistem perekonomian kolonial. Perkebunan pada awal perkembangannya hadir sebagai sistem perekonomian baru yang semula belum dikenal, yaitu sistem perekonomian pertanian komersial (*commercial agriculture*) yang bercorak kolonial. Sistem perkebunan itu pada dasarnya adalah sistem perkebunan Eropa (*European Plantation*), yang berbeda dengan sistem kebun (*garden system*) yang telah lama berlaku di negara-negara berkembang pada masa pra-kolonial. Sebagai sistem perekonomian pertanian baru, sistem perkebunan telah memperkenalkan berbagai pembaharuan dalam sistem perekonomian pertanian yang membawa dampak perubahan penting terhadap kehidupan masyarakat tanah jajahan atau negara-negara berkembang. Oleh karena itu perkembangan perkebunan di negara-negara berkembang berkaitan erat dengan proses modernisasi.

Menurut Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991:7), “Gerakan kolonialisme yang didukung oleh perkembangan kapitalisme agraris barat,

memandang tanah jajahan menjadi sumber kekayaan bagi negara induk”. Lebih lanjut Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991:7) menambahkan:

Tersedianya tanah dan tenaga kerja murah yang melimpah di tanah jajahan, memungkinkan untuk dilakukan eksploitasi produksi pertanian yang menguntungkan bagi pasaran dunia. Sistem perkebunan dalam hubungan ini dipandang sebagai cara yang tepat untuk diterapkan. Pelaksanaan sistem perkebunan dimulai dengan melalui pembukaan penanaman modal dan teknologi dari luar, dan memanfaatkan tanah dan tenaga kerja yang tersedia di tanah jajahan.

Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991) lebih lanjut menambahkan, kehadiran komunitas perkebunan di tanah jajahan, melahirkan lingkungan yang berbeda dengan lingkungan setempat baik dari segi lokasi, tata ruang, ekologi, maupun organisasi sosial dan ekonomi. Secara topografis, perkebunan sering dibangun di daerah yang subur, baik yang ada di daerah dataran rendah maupun yang ada di dataran tinggi. Tanaman yang dibudidayakan homogen (komoditi ekspor), dan berbeda dengan tanaman pertanian subsisten setempat. Demikian pula organisasi dan sistem kerja, serta proses produksinya. Lebih lanjut Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991:7-8) menambahkan:

Sistem perkebunan di lingkungan masyarakat agraris tradisional di tanah jajahan atau negara-negara berkembang, dianggap telah menciptakan tipe perekonomian kantong (*enclave economics*) yang bersifat “dualistis” (*“dualistic” economy*). Kehadiran perkebunan digambarkan telah menciptakan komunitas sektor perekonomian “modern”, yang berorientasi ekspor dan pasaran dunia, di tengah-tengah lingkungan komunitas sektor perekonomian “tradisional” dan subsisten”. Hubungan kedua sektor, modern dan tradisional dalam kehidupan perekonomian di negara-negara kolonial atau berkembang, sering digambarkan sebagai hubungan perekonomian “dualistik” atau ganda.

Perkebunan, sebagai perusahaan komersial, biasanya dikelola oleh maskapai asing dan berorientasi kepada kepentingan negara-negara besar yang menjadi tempat pemasaran barang produksinya. Sifat “internasional” atau “*ekstrateritorial*” perkebunan semacam itu sering memiliki pengaruh penting terhadap kehidupan ekonomi dan politik di negara perkebunan tersebut, terutama pada masa sesudah merdeka. Perkebunan tidak hanya menempati kedudukan penting dalam bidang ekonomi, tetapi juga mencerminkan situasi dualistis, yang

pada hakekatnya berakar pada diskriminasi ras. Menurut Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991: 9):

Secara struktural di perkebunan terdapat dua lapisan sosial, yaitu lapisan asing dan pribumi. Golongan pertama menempati jabatan teras dengan pendapatan tinggi, seperti jabatan pimpinan, staf pengelola, administrator, dan tenaga spesialis. Golongan kedua menempati kedudukan sebagai pekerja kasar atau buruh, dengan upah rendah. Hanya sedikit golongan pribumi yang menempati lapisan menengah.

Upah kerja (*wages*) rendah dan fasilitas kehidupan terbatas merupakan ciri perkebunan pada masa kolonial. Perlu dicatat bahwa sementara perkebunan ada yang memberikan fasilitas tempat tinggal bagi pekerjanya, misalnya dalam bentuk barak-barak atau rumah-rumah tinggal sementara yang dibangun di tanah perkebunan. Keadaan tempat tinggal itu biasanya jelek. Hal ini berlaku biasanya apabila para pekerja didatangkan dari tempat yang jauh, atau karena lokasi perkebunan jauh dari perkampungan penduduk setempat. Perbedaan sosial ekonomi yang besar kedua golongan itu sering menyebabkan timbulnya situasi konflik di tanah perkebunan. Dengan demikian, perkebunan sebagai eksploitasi sumber daya tanah dan tenaga produksi komoditi ekspor, menciptakan lingkungan baru yang bersifat dualistis, yaitu lingkungan “asing” yang menjalankan perekonomian “modern” yang berorientasi pada ekspor dan pasaran dunia serta lingkungan “pribumi” dengan perekonomian “tradisional” atau “*subsisten*”-nya.

Dengan hadirnya perkebunan membawa dampak yang luas, baik bagi Pengusaha swasta Barat, penguasa lokal maupun rakyat. Menurut Soeharjo Hatmosoebro (1995), bagi pengusaha swasta Barat, dengan dibukanya perkebunan dalam lingkup perusahaan perkebunan, akan menghasilkan produksi yang besar dan yang lebih luas lagi akan dapat menambah pemasukan bagi negara induknya. Lebih spesifik lagi, pembukaan perkebunan akan mampu menjawab krisis keuangan yang sedang dihadapi Belanda akibat kekosongan kas negara sebagai dampak dari perang dengan Perancis dan kebangkrutan VOC. Bagi penguasa lokal, dengan adanya perkebunan yang dibuka oleh pengusaha swasta Barat, membuat kekuasaan yang mereka miliki makin kuat, karena para penguasa lokal banyak dilibatkan dalam proses pembukaan perkebunan, dalam bentuk

pengerahaan tenaga kerja rakyat atas permintaan pemerintah kolonial. Sebagai kompensasinya kekuasaan pemerintahan tradisional tidak akan diganggu. Selain itu penguasa lokal juga dapat menikmati fasilitas yang diberikan pemerintah kolonial sebagai imbalan atas kerjasama yang telah dilakukan. Bagi rakyat, dengan dibukanya perkebunan oleh pengusaha swasta Barat, dapat mengenal sistem pertanian modern serta sistem uang/monetisasi. Namun di lain pihak, pembukaan perkebunan juga berpengaruh terhadap budaya masyarakat agraris, yaitu dari masyarakat yang terkenal dengan sistem kekerabatan yang kental menjadi masyarakat yang lebih longgar dalam menerapkan aturan hidup bermasyarakat. Contoh lain adalah dalam hal pola pemilikan tanah yang menjadi makin longgar. Hal pemilikan tanah bukan hanya milik kaum bangsawan saja tapi juga rakyat bawah meskipun sangat terbatas.

3. Krisis

a. Definisi Krisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), krisis adalah suatu keadaan yang genting, bahaya, suram, misalnya krisis moral, krisis ekonomi dan lain-lain. Pengertian krisis yang lain adalah dari Peter Salim (1991), yang mendefinisikan krisis sebagai suatu keadaan yang suram (dalam bidang ekonomi), yang ditandai oleh adanya tingkat pengangguran yang tinggi, devisa negara yang sangat kecil, dan kendala lain yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi di negara sedang berkembang.

AB. Susanto, dalam <http://www.vision.net.id/tiara/205/style.html>, mendefinisikan krisis dilihat dari segi psikologi, diuraikan bahwa krisis adalah suatu perubahan yang dirasakan sangat mendadak dan mengganggu keseimbangan. M. Ninik Handayani, S.Psi, dalam <http://www.iqeq.web.id/art15.shtml>, yang mengatakan krisis sebagai suatu perubahan atau peristiwa yang timbul mendadak dan mengguncangkan keseimbangan seseorang di luar jangkauan daya penyesuaian sehari-hari. Misalnya, krisis di bidang usaha, hubungan keluarga dan sebagainya. Bernstein dalam

<http://www.marxist.com/indonesia/ror/5/html>, mendefinisikan krisis dilihat dari sudut pandang ekonomi kapitalis, dinyatakan bahwa:

Krisis hanyalah kekacauan mekanisme ekonomi. Dengan berhentinya kekacauan itu, mekanisme akan bisa berfungsi dengan baik. Namun faktanya ialah bahwa krisis bukanlah “kekacauan” dalam makna kata yang biasanya. Krisis adalah kekacauan-kekacauan yang tanpa itu ekonomi kapitalis tidak bisa berkembang sama sekali. Karena apabila krisis itu memunculkan satu-satunya metode yang mungkin dalam kapitalisme, dan karena itu, merupakan metode yang normal, untuk menyelesaikan secara periodik konflik yang ada antara perluasan produksi yang tak terbatas dan batas-batas sempit pasar dunia, maka krisis adalah manifestasi organik yang tidak bisa dipisahkan dari ekonomi kapitalis.

Menurut Soerjono Sekanto (1993), krisis sebagai suatu halangan yang terjadi terhadap kejadian – kejadian yang berlangsung secara reguler. Sedang Sartono Kartodirdjo (1987) memberikan definisi krisis sebagai suatu proses disintegrasi yang mengganggu fungsinya suatu sistem. Lebih lanjut Sartono Kartodirdjo (1987:45) mengatakan:

Dalam hal ini masyarakat menghadapi masalah untuk “*survival*” atau menjadi “*to be or not to be*”. Jika masyarakat tidak mampu mengatasi proses disintegrasi, maka akan mengalami kepunahanlah masyarakat itu. Namun bila masyarakat mampu mengatasinya, maka akan survive-lah masyarakat itu. Ada kalanya krisis juga timbul karena adanya fase transisional, yaitu apabila ditemukan norma-norma baru untuk memulihkan keutuhan masyarakat.

Selanjutnya Sartono Kartodirdjo (1987:46) menambahkan:

Ada teori yang mengartikan krisis dari dua sudut pandang, yaitu menurut teori idealisme dan teori determinisme materialistis. Menurut teori idealisme, krisis adalah refleksi dari disintegrasi mental dan spiritual yang disebabkan oleh konflik ideologis yang fundamental. Sedang menurut teori determinisme materialistis, krisis timbul sebagai akibat perjuangan kelas yang ditimbulkan oleh perubahan sistem produksi berdasarkan teknologi baru.

Dari berbagai pendapat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa krisis adalah suatu keadaan yang tidak stabil dalam suatu kelompok, individu, yang ditandai oleh kondisi yang genting, gawat, tidak stabil, dan kondisi itu

mengakibatkan terganggunya suatu proses yang telah lama berlangsung dalam kelompok atau individu itu dan kondisi itu berlangsung secara reguler.

b. Jenis-jenis Krisis

Menurut Soerjono Soekanto (1993: 49) krisis bisa dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

Krisis aksiologi, krisis budaya dan krisis alam. Krisis aksiologi (nilai) adalah krisis yang terjadi pada nilai-nilai yang berjalan dalam suatu masyarakat. Sementara krisis budaya adalah krisis yang terjadi dalam suatu kebudayaan masyarakat dan krisis alam adalah krisis sosial yang terjadi karena adanya faktor-faktor fisik atau biologis.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1986:450), membagi dua jenis krisis yaitu krisis ekonomi dan krisis moral:

Krisis ekonomi ditandai oleh adanya kondisi berupa tidak stabilnya ekonomi, dengan indikasi adanya pengangguran yang tinggi, inflasi yang besar, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Sedang krisis moral adalah krisis yang menyangkut perilaku dan nilai-nilai yang sudah tidak dihiraukan lagi oleh kelompok atau individu. Semua kondisi tadi bermuara pada suatu kondisi tidak stabilnya keadaan dan penuh gejolak.

Krisis *malaise* yang terjadi pada tahun 1930 adalah salah satu contoh krisis ekonomi, di mana saat itu semua bagian dunia merasakan akibatnya, termasuk daerah Hindia Belanda, yang saat itu sedang menggalakkan sektor perkebunan yang menghasilkan komoditi ekspor bagi pasaran dunia. Hasil perkebunan dari Hindia Belanda yang dijual di pasaran dunia mengalami kehancuran.

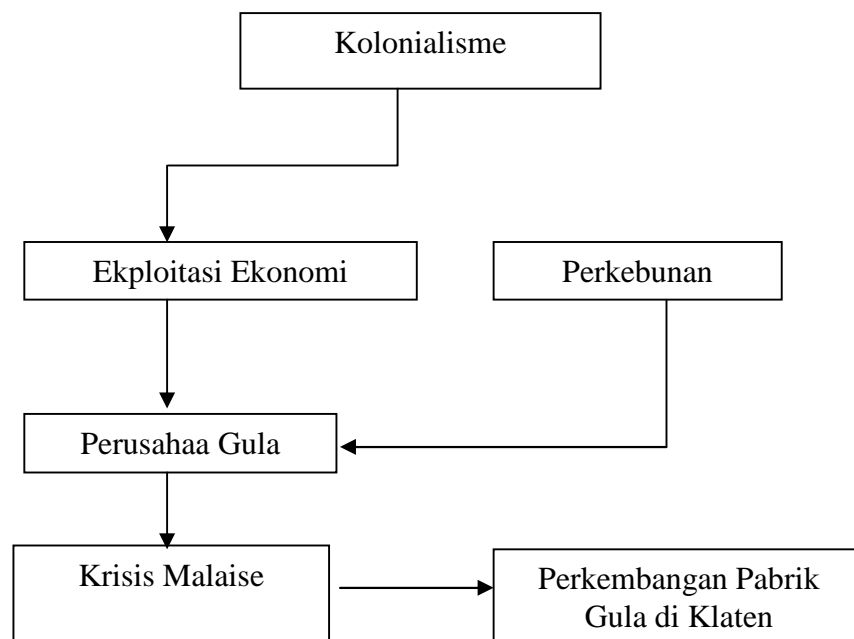
c. Akibat Krisis

Sebagai suatu fenomena yang selalu dihadapi oleh individu maupun kelompok, krisis membawa dampak yang luas hampir di semua sektor. Misalnya krisis budaya, yang menyebabkan hilangnya identitas budaya yang dimiliki oleh suatu bangsa akibat pengaruh budaya luar. Menurut Sartono Kartodirdjo (1987), akibat yang ditimbulkan dari adanya krisis adalah terganggunya sistem dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya proses disintegrasi dalam masyarakat,

dimana mereka menghadapi masalah untuk survival dan bila mereka tidak mampu, maka akan punahlah masyarakat itu.

Krisis *Malaise* tahun 1930 membawa dampak yang luas bagi negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia yang saat itu masih di bawah penjajahan Belanda. Seperti diketahui bahwa saat itu di Jawa banyak didirikan pabrik yang mengolah hasil perkebunan rakyat, contohnya gula. Jawa saat itu merupakan penghasil gula terbesar kedua di dunia sesudah Kuba, tetapi akibat adanya krisis *malaise* produksi gula dari Hindia Belanda mengalami kehancuran di pasaran dunia.

B. Kerangka Berpikir



Dari bagan di atas dapat diterangkan sebagai berikut:

Sejarah perkebunan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme pada umumnya, karena kolonialisme merupakan suatu usaha yang sistematis dari penjajah untuk menguasai sekaligus mengambil segala yang ada di negara jajahan. Kolonialisme terwujud dalam tiga bentuk, yaitu penetrasi kebudayaan, dominasi politik dan eksploitasi ekonomi sumber alam. Dan yang

berhubungan dalam masalah perkebunan ini adalah aspek eksploitasi sumber alam.

Eksplorasi merupakan salah satu upaya penjajah untuk mengeruk segala sumber alam yang ada di tanah jajahan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari negara penjajah. Salah satu bentuk eksploitasi sumber alam adalah perkebunan tebu yang nantinya akan menghasilkan gula. Di Jawa pada masa penguasaan kolonial Belanda, banyak dibuka perkebunan gula, karena di Jawa tersedia tenaga kerja yang banyak dan murah. Hal ini kemudian banyak mendorong berdirinya Pabrik Gula (PG) di Jawa. Pada periode 1930, di Jawa terdapat 179 buah PG yang sangat menopang kehidupan ekonomi pemerintah Hindia Belanda, salah satu diantara sekian banyak PG yang ada di Jawa adalah PG Gondangwinangun di Klaten.

Memasuki tahun 1930-an, kondisi ini berubah dratis dengan terjadinya krisis *malaise* yang menimpa semua negara di dunia. Hal ini membawa pengaruh yang luas bagi perkembangan PG yang ada di Jawa, termasuk di antaranya adalah PG Gondangwinangun Klaten.

3	Perizinan			xx	xx									
4	Pengumpulan Data					xx	xx	xx	xx					
5	Analisis Data									xx	xx			
6	Laporan											xx		

B. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto (1984:5).”Metode penelitian adalah suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian; Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; dan Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur”. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, n 34 yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode historis. Menurut Gilbert J. Garraghan yang dikutip Ibrahim Alfian (1987), metode historis adalah seperangkat asas dan kaidah yang sistematis yang digubah secara efektif untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilai secara kritis dan menyajikan suatu sintesa hasil yang dicapai, pada umumnya dalam bentuk tulisan. Menurut Louis Gottschalk (1975), metode historis sebagai suatu kajian untuk mengumpulkan, menguji dan menganalisis data yang diperoleh dari masa lampau kemudian merekonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan historiografi. Berdasarkan pendapat Louis Gottschalk di atas, maka dalam penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka menghasilkan suatu penulisan sejarah adalah mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan tema yang akan ditulis, kemudian mengadakan kritik terhadap data yang telah diperoleh, selanjutnya menafsirkan makna yang saling berhubungan dengan data-data yang diperoleh untuk selanjutnya menyusun suatu cerita sejarah.

C. Sumber Data

1. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui tentang obyek yang akan diteliti serta mau memberikan keterangan-keterangan mengenai data yang diperlukan dalam penelitian. Pengetahuan yang dimiliki narasumber diperoleh baik melalui pengalaman sendiri maupun cerita langsung.

Dalam penelitian ini, narasumber yang dapat ditemui adalah dari staf Pabrik Gula (PG) Gondangwinangun dan Petugas Perpustakaan Museum Gula Jawa Tengah.

2. Arsip, Buku, Majalah dan Surat Kabar

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data tertulis berupa arsip, buku, majalah dan surat kabar. Sedangkan data tertulis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hadari Nawawi (1990:80):

Data primer yakni data *authentik* atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan, secara sederhana data ini disebut juga data asli. Sedangkan data sekunder yakni data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat *authentik* karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan selanjutnya, atau data tersebut tidak asli.

Data Primer dalam penelitian ini berupa arsip yang didapatkan dari arsip Perpustakaan Sono Pustoko Keraton Surakarta, PG. Gondangwinangun, dan Museum Gula Jawa Tengah. Sedangkan data sekunder berupa buku, majalah dan surat kabar di dapatkan dari Perpustakaan Program Sejarah FKIP UNS, Perpustakaan FKIP, Perpustakaan Fakultas Sastra UNS, Perpustakaan Pusat UNS, Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra UGM dan Perpustakaan Pusat Studi Kependudukan UGM.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (1990:126), yang dimaksud dengan wawancara adalah, "Percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu".

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau data-data yang diperlukan serta untuk lebih memahami terhadap obyek penelitian secara cermat dan akurat sehingga diperoleh data serta keobyektifitasan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terpimpin (*guided interview*), yaitu suatu teknik wawancara di mana pewawancara telah mempersiapkan dengan masak pedoman-pedomannya, tema yang akan ditanyakan dan pelaksanaannya.(Kartini Kartono,1990). Dalam teknik ini, kerangka pokok dari tema yang akan ditanyakan telah disusun sebelumnya dan tinggal diaplikasikan di lapangan. Bentuk wawancaranya berupa wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan narasumber menggunakan pertanyaan yang memungkinkan narasumber menjawab dengan memberikan keterangan yang panjang, tidak hanya jawaban “ya” atau”tidak”.

2. Studi Pustaka

Selain melalui wawancara, juga didapat melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang ada di ruang perpustakaan. Materi tersebut antara lain berupa arsip, buku-buku, majalah dan surat kabar, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sistem kartu atau menggunakan katalog. Sistem kartu ini mencatat beberapa sumber tertentu mengenai pengarang, judul buku, subyek dan isinya. Karena itu perlu mengingat beberapa kata kunci (*key words*) yang terdapat di dalam subyek yang dibahasnya, sehingga dapat menemukan buku dan artikel yang dimasukkan dalam katalog di bawah salah satu di antara kata-kata kunci.

Dalam usaha mengumpulkan data melalui teknik studi pustaka, peneliti melakukan pencatatan isi yang diperoleh dari arsip, buku-buku, majalah dan surat kabar yang memuat tentang permasalahan yang diteliti sehingga data yang dibutuhkan dapat terkumpul.

E. Analisis Data

Analisis data historis adalah analisis yang mengutamakan ketajaman dan kekuatan dalam menginterpretasikan data dalam sejarah. Interpretasi dilaksanakan karena fakta sejarah tidak bisa berbicara sendiri. Kategori dari fakta-fakta sejarah mempunyai sifat sangat kompleks, sehingga suatu fakta tidak bisa atau tidak dapat dimengerti akan dilukiskan dengan fakta itu sendiri.(Sartono Kartodirdjo, 1982).

Berkaitan dengan penyajian atau presentasi fakta, interpretasi dan kesimpulan yang cenderung memiliki subyektifitas, terutama dalam abstraksi fakta, maka untuk mengurangnya seorang peneliti harus mempunyai kerangka teoritik dan metodologi yang kuat, sehingga fakta sejarah yang telah melalui kritik sumber dan interpretasi akan dapat menjadi suatu cerita yang dapat dipercaya kebenarannya. (Taufik Abdullah, 1987).

Berdasarkan keterangan di atas, maka langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam kegiatan analisis data adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan sumber-sumber sejarah yang saling mendukung penelitian yang memadai, sehingga mempermudah proses perbandingan antar sumber.
2. Menggunakan pendekatan yang berupa kerangka teori yang didapat dari teori ilmu-ilmu sosial, terutama ilmu politik dan ekonomi, konsep dan metodologi yang berfungsi sebagai kriteria penyelesaian, identifikasi dan pengklasifikasian.

F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah penelitian yang harus dijalani seorang peneliti sebelum menghasilkan sebuah hasil penelitian yang diharapkan. Adapun prosedur yang dilakukan:

1. Heuristik

Heuristik adalah kegiatan untuk menghimpun jejak-jejak masa lampau dengan cara mencari sumber-sumber sejarah. Dalam penelitian ini untuk menemukan sumber-sumber sejarah digunakan teknik studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Di dalam perpustakaan bisa ditemukan arsip,

buku, majalah dan surat kabar yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yakni pengaruh krisis malaise terhadap pabrik gula di Kabupaten Klaten.

2. Kritik

Kritik dilakukan setelah data-data sejarah terkumpul. Kritik dilakukan guna memperoleh keabsahan sumber. Keabsahan sumber dicari melalui pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) sumber. (Helius Sjamsuddin,1994). Dalam prosedur sejarah cara tersebut dilakukan melalui proses kritik sumber, yaitu :

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern yaitu kritik terhadap keslian sumber (otentisitas) yang berkenaan dengan keberadaan sumber, apakah sumber itu dikehendaki atau tidak, masih asli atau sudah turunan. Menurut Dudung Abdurrahman (1987), uji otentisitas minimal dilakukan dengan pertanyaan: kapan, di mana, siapa, bahan apa serta bagaimana sumber itu dibuat.

Kritik ekstern dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat tanggal, bulan, tahun serta siapa pengarang atau penulis sumber tersebut dengan mengidentifikasi sikap serta latar belakang pendidikan dari pengarang.

b. Kritik intern

Kritik intern dilakukan untuk mencari kredibilitas sumber, nilai bukti apakah yang ada di dalam sumber sejarah itu. Kritik intern digunakan untuk membuktikan apakah kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber dapat dipercaya atau tidak. Hal ini bisa terbukti bila pemberi kesaksian menggunakan prinsip positifisme yang mengandung pengertian bahwa saksi primer mampu dan berkeinginan menceritakan kebenaran atau dengan akurat melaporkan secara terperinci mengenai hal yang diteliti untuk mendapatkan kolaborasi atas kesaksian yang merdeka dari dua atau lebih saksi yang dapat dipercaya. (Louis Gottschalk, 1985). Kritik intern dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain sehingga didapatkan fakta sejarah yang benar-benar relevan dengan tema penelitian.

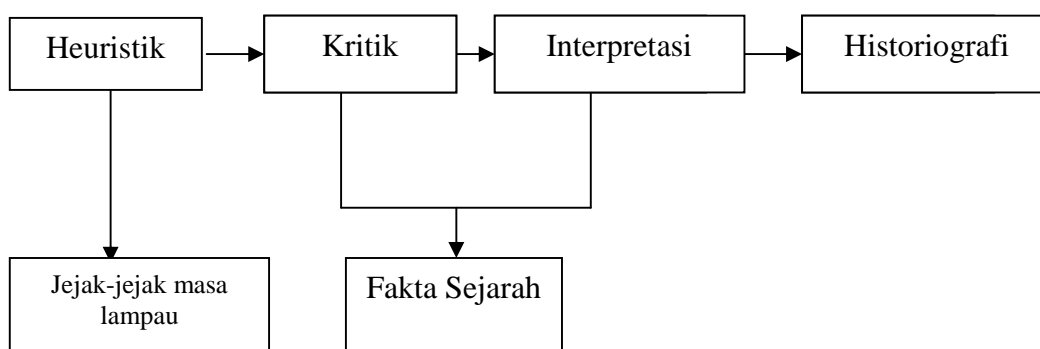
3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah sering disebut dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan dan secara terminologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. (Kuntowijoyo, 1995). Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. (Berkhofer, dalam Alfian, 1994).

Interpretasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menafsirkan dan menetapkan makna serta hubungan dari fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang telah diseleksi tersebut dihubungkan satu sama lain sehingga muncul fakta yang relevan yang akan menjadi suatu kesatuan kisah sejarah.

4. Historiografi

Historiografi merupakan kegiatan menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah. Langkah terakhir ini merupakan langkah menulis jejak-jejak sejarah yang telah dikumpulkan, dianalisis dan ditafsirkan sehingga tersusun sebuah karya sejarah. Adapun prosedur penelitian digambarkan dalam skema di bawah ini :



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Deskripsi Geografis

Pabrik Gula (PG) Gondangwinangun merupakan salah satu dari 9 pabrik gula yang berada di wilayah Kabupaten Tingkat II Klaten. PG Gondangwinangun terletak di wilayah Kabupaten Klaten bagian barat, tepatnya terletak di Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan kurang lebih 4 ½ km dari Kabupaten Klaten. Letak PG Gondangwinangun tersebut sangat strategis karena ditunjang oleh kemudahan-kemudahan, antara lain : lokasi dan kualitas tanah yang memenuhi syarat teknis untuk menanam tebu, tersedianya air yang cukup untuk tanaman tebu, tersedianya prasarana jalan dan jembatan untuk pengangkutan tebu ke pabrik dan tersedianya tenaga kerja yang cukup banyak untuk keperluan dalam pabrik maupun di perkebunan untuk menanam tebu. (Werner Roll, 1983).

Berdasarkan letak geografisnya, areal PG Gondangwinangun dibatasi oleh lerang Gunung Merapi di bagian utara, bagian selatan dibatasi oleh Pegunungan Kidul, bagian barat dibatasi oleh aliran Sungai Opak dan bagian timur dibatasi oleh areal dari PG Ceper Baru.

a. Keadaan Tanah

Kondisi tanah sangat baik terutama di bagian tengah Kabupaten Klaten, terdiri dari tanah abu mineral andesit (*andosole, vertisole atau grumusole*) yang memungkinkan produktivitas tinggi untuk pertanian, karena adanya sifat tanah yang alamiah dan secara kimiawi menguntungkan.

b. Keadaan Iklim

Iklim di wilayah Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis yang dalam waktu satu tahun dibedakan atas dua musim, yaitu : musim penghujan (Nopember – April) dan musim kemarau (Mei-Oktober). Iklim tersebut sangat cocok untuk tanaman tebu di mana dalam pertumbuhannya sangat membutuhkan air dan pada waktu akan ditebang dibutuhkan bulan-bulan kering untuk mempercepat masaknya/tuanya tebu⁴¹ gga adanya musim penghujan dan musim kemarau tersebut sangat cocok untuk mengusahakan tanaman tebu.

c. Keadaan Angin

Di wilayah Kabupaten Klaten, bertiup angin musim yang mendatangkan hujan dalam bulan Nopember – April dan kering pada builan Mei – Oktober, bergantian tiap setengah tahun sekali. Kadang-kadang bertiup angin kencang yang dapat merusak perkebunan tebu, tetapi hal itu tidak tetap dalam tiap tahunnya. (Werner Roll, 1983).

d. Tinggi Tempat

Daerah penanaman tebu oleh PG Gondangwinangun mempunyai ketinggian lebih kurang 164 m di atas permukaan air laut. Ketinggian tersebut cukup baik untuk tumbuhnya tanaman tebu.

e. Temperatur

Untuk mengetahui keadaan temperatur di Klaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1 Angka rata-rata maximum dan minimum dari temperatur di Klaten tahun 1937 (dalam derajat Celcius)

Bulan	Temperatur		
	Rata-rata	Maximum	Minimum
1. Januari	25,6	29,9	22,9
2. Februari	26,0	31,3	22,9
3. Maret	26,3	31,3	23,0
4. April	26,4	31,0	23,3
5. Mei	26,4	31,1	22,7
6. Juni	25,9	30,8	22,2
7. Juli	24,8	30,7	20,2
8. Agustus	25,1	31,9	20,0
9. September	26,4	33,0	21,8
10. Oktober	27,0	33,5	22,4
11. Nopember	27,3	33,4	23,2
12. Desember	25,5	30,0	22,9
Per tahun	26,1	31,5	22,3

Sumber : Data Monografi Kabupaten Klaten tahun 1937.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan, bahwa keadaan temperatur memenuhi syarat pertumbuhan tebu, karena temperatur rata-rata tiap tahun lebih tinggi dari 21 C.

2. Deskripsi Demografis

Menurut Kontjaraningrat (1984), bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan, terutama terpusat di Pulau Jawa. Demikian juga masyarakat di wilayah Kabupaten Klaten, mereka pada umumnya bertempat tinggal di pedesaan. Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Klaten pada tahun 1930 tercatat 573.575 orang dengan kepadatan penduduk sebanyak 981 orang/km². Hal ini berarti selama 10 tahun telah terjadi kenaikan jumlah penduduk sekitar 75.862 orang atau sekitar 13%. Jumlah pertambahan penduduk di Kabupaten Klaten ini termasuk dalam kategori tinggi, teristimewa di daerah-

daerah tempat industri, seperti Klaten, Ketandan, Wedi, Delanggu, Pedan dan Ceper adalah daerah yang berpenduduk padat sekali. (Werner Roll, `1983).

Pada hakikatnya yang menyebabkan pertambahan penduduk tinggi adalah adanya anggapan masyarakat pedesaan mempunyai anak merupakan investasi demi masa depan, keturunan berarti banyak tenaga untuk memperoleh penghasilan keluarga dan menjadi jaminan untuk hari tua. Hubungan keluarga, hukum adat dan lapisan sosial di pedesaan menentukan cara berpikir dan kelakuan penduduk di desa-desa. Namun ternyata sebaliknya, persentase kaum muda yang tinggi melebihi jumlah pencari nafkah yang persentasenya relatif kecil menyebabkan bagian pendapatan yang diperoleh penduduk dan jatah pendapatan boleh dikatakan rendah. Hal ini berarti menjadi beban berat bagi penduduk yang bekerja terutama di bidang pertanian yang harus menanggung biaya hidup sehari-hari, pendidikan, dan lain sebagainya.

3. Kondisi Sosial ekonomi Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Klaten

a. Kondisi Sosial

Berdasarkan mata pencahariannya masyarakat pedesaan di Kabupaten Klaten dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang heterogen, karena terdapat bermacam-macam jenis mata pencaharian, namun pada dasarnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman pokok yang diusahakan adalah tanaman padi (bahan makanan pokok). Adapun jenis-jenis padi yang ditanam adalah jenis *Sinta*, *Bengawan*, *Slogo*, disamping juga menanam palawija, seperti kacang tanah, kacang kedelai, singkong, ubi, jagung. Dari panen padi dan palawija inilah para petani memperoleh penghasilan.

Masyarakat pedesaan di wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi lapisan-lapisan yang didasarkan atas perbedaan hak atas tanah dan kewajiban-kewajiban yang menyertainya. Lapisan-lapisan masyarakat itu antara lain :

1) *Petani Kenceng*

Merupakan kelompok petani yang merupakan penduduk desa yang sudah lama bertempat tinggal di situ dan menganggap dirinya sebagai keturunan kelompok pendiri desa, sehingga mereka merupakan para

pemilik dari bangunan rumah, pekarangan rumah dan *persil-persil* tanah persawahan dan tanah pertanian tegalan. Mereka diberi prioritas untuk memperoleh hak menggarap *tanah gogolan*, yaitu tanah pertanian milik masyarakat desa yang hak pemanfaatannya biasanya dibagi-bagi kepada sejumlah petani, karena itu mereka disebut juga sebagai *petani gogol*.

2) *Petani Setengah Kenceng*

Yaitu para pemilik bangunan rumah dan pekarangan rumah tetapi tidak mempunyai sawah.

3) *Petani Gundul*

Yaitu para pemilik *persil* tanah persawahan atau tanah pertanian tegalan tetapi tidak memiliki pekarangan rumah sendiri.

4) *Petani Ngindhung*

Yaitu para pemilik tanah dan pekarangan di atas tanah orang lain

5) *Petani Templek*

Yaitu para petani yang tidak memiliki tanah dan tidak memiliki pekarangan, kebanyakan terdiri dari orang yang sudah kawin yang tinggal di rumah sendiri dengan rumah tangga sendiri tetapi didirikan di atas tanah pekarangan orang lain

6) *Petani Tlosor*

Yaitu petani-petani yang sudah kawin, tidak memiliki tanah, tidak memiliki tempat tinggal sendiri dan hidup di tempat keluarganya. (Werner Roll, 1983).

Selama jaman penjajahan kolonial Belanda, mereka yang termasuk lapisan-lapisan masyarakat tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Lapisan-lapisan masyarakat yang memiliki tanah persawahan seperti petani *kenceng* dan petani *gundul* mempunyai hak pilih pada rapat desa, mempunyai kewajiban menyerahkan tenaga kerjanya kepada pemerintah dan kewajiban membayar pajak tanah, sedangkan mereka yang tidak memiliki tanah persawahan seperti petani

setengah kenceng, petani *ngindhung*, petani *templek* dan petani *tlosor*, mereka tidak mempunyai hak pilih dan mereka secara resmi tidak menanggung beban membayar pajak tanah. Perbedaan hak dan kewajiban yang berlaku dalam lapisan sosial masyarakat pedesaan di wilayah Kabupaten Klaten dihapus setelah Indonesia merdeka. (M.M. Billah, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, 1984:264 lihat juga Takashi Shiraishi, 1997 : 28).

b. Kondisi Ekonomi

Pertambahan penduduk yang tinggi itu, mengakibatkan perbandingan antara pemilik tanah dan mereka yang tidak memiliki tanah persawahan di wilayah Kabupaten Klaten makin besar. Dalam lapisan masyarakat pedesaan, hak-hak penggunaan tanah yang berbeda-beda menentukan keadaan ekonomi seseorang. Keadaan ini menimbulkan adanya berbagai tingkat sosial di lingkungan masyarakat pedesaan.

Pada tahun 1938, di daerah *regent* Klaten terdapat tanah milik desa seluas 8.266 ha di mana 3.547 ha digunakan untuk keperluan dinas (*lungguh*), 2.363 ha untuk keperluan orang pensiunan (*pituas*) dan 2.356 ha untuk keperluan kas desa.

Tabel. 2 Tanah milik desa di distrik-distrik bekas *regent* Klaten tahun 1938 (dalam ha)

Distrik	Lungguh		Pituas		Kas Desa	
	Sawah	Tegalan	Sawah	Tegalan	Sawah	Tegalan
Klaten	67	2	352	21	280	38
Gondangwinangoen	775	365	530	187	337	168
Jatinom	529	146	316	99	360	182
Delanggu	724	-	334	3	339	73
Beji	839	80	511	30	444	135
Jumlah	2954	593	2023	340	1760	596

Sumber : *Het Particuliere Landbouwcrediet in het Soenanant Soerakarta*, dalam *Volkscredietwezen/Batavia 1939*.

Semua hak atas seluruh tanah di wilayah Kabupaten Klaten adalah mutlak di tangan raja, karena Kabupaten Klaten merupakan bekas wilayah Kasunanan

Surakarta, kemudian sedikit demi sedikit kekuasaan itu dikurangi dan dialihkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Selama tanah milik untuk pertanian tidak digunakan untuk keperluan raja, tanah itu diijinkan untuk digunakan sebagai *gaduhan* atau *apanage* oleh anggota keluarga raja atau kepada pegawai negara yang berdarah ningrat, agar mereka mengurus dan memungut pajaknya. Para pemungut pajak atau sering disebut *patuh* sebagian besar hidup di kraton menyerahkan hak kekuasaan mereka kepada orang-orang yang disebut *bekel* yang kedudukannya lebih rendah dari mereka yang hidup di pedesaan. Sebagai imbalan para pemungut pajak menerima hasil bersih $\frac{1}{5}$ dari bidang tanah *kebekelan* yang digarap penduduk setempat. Tanah ini merupakan tanah dinas bagi pemungut pajak (*lungguh*). Sisanya, $\frac{4}{5}$ bagian dari tanah garapan boleh dikerjakan oleh penduduk dengan membayar sewa, sehingga penduduk tidak memiliki tanah sama sekali, mereka hanya diijinkan mengerjakan bidang-bidang di areal yang ditunjuk dan mereka harus menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil tanah persawahan kepada raja. (Mubyarto, 1992). Setelah adanya tindakan perombakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda mulai tahun 1912, yaitu keluarnya UU tentang reorganisasi agraria, menghasilkan aturan-aturan baru dalam bidang pertanian yaitu :

- 1) Sistem *apanage* dihapus, yang bertujuan agar ada kepastian usaha bagi modal swasta, termasuk penyederhanaan manajemen.
- 2) Beberapa kesatuan tempat tinggal seperti desa, dukuh atau *kebekelan* digabung menjadi kesatuan administrasi baru yaitu kelurahan.
- 3) Perubahan dalam sistem administrasi desa yaitu jabatan *bekel* dihapus dan diganti dengan lurah.
- 4) Raja melepaskan haknya atas tanah yang termasuk wilayah kesatuan administrasi yang kemudian kemudian diberikan kepada petani dengan hak *andarbe* (milik) secara individual.
- 5) Diadakan pembagian baru dari persil-persil tanah garapan untuk penduduk desa dan disesuaikan pada kebutuhan tertentu dari usaha pertanian Belanda. (Suhartono, 1991: 3 - 4, dan 94 lihat juga Takashi Shiraishi, 1997: 24-28).

Pembagian dari *persil-persil* tanah garapan itu diatur sebagai berikut: tiap-tiap desa harus menyediakan 1/5 bagian dari tanah pertanian untuk areal *lungguh*, kas desa dan *pituas*. Tanah yang luasnya sudah ditetapkan dan dimaksudkan untuk kepentingan umum masyarakat desa (*bumi kongsen*) mempunyai fungsi, antara lain :

- a) *Persil lungguh* atau bidang tanah guna keperluan dinas yang juga disebut dengan *bengkok*, diserahkan kepada pamong-pamong desa untuk digarap selama masa dinasnya sebagai ganti upah. Besarnya bagian tanah garapan milik dinas ini diperinci menurut jumlah dan jabatan atau tugas masing-masing pimpinan desa.
- b) Areal tanah garapan kas desa yang juga dikenal dengan istilah *bondo* atau *banda* desa. Hasil dari areal-areal ini digunakan untuk pembiayaan keperluan desa. Biasanya areal tanah garapan ini disewakan kepada penduduk yang berminat dengan jangka waktu yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan tanah. Hasil tanah atau uang dari para penyewa dimasukkan ke kas desa.
- c) Tanah *pituas* atau tanah pertanian bagi orang pensiunan gunanya untuk menyambung kebutuhan hidup dari para *bekel* yang sudah habis masa jabatannya karena tindakan perombakan. (Werner Roll, 1983).

Sisa dari pembagian *persil* tanah, yaitu 4/5 bagian dari tanah-tanah garapan desa dibagi-bagi kembali menjadi *persil-persil* dan di bawah pengawasan administrasi Belanda diberikan kepada pimpinan keluarga yang mampu bekerja sebagai hak milik atau hak pakai yang sudah ditetapkan dan dapat diwariskan. Tiap-tiap bidang tanah perseorangan atau *sanggan* luasnya hampir sama dan biasanya meliputi tidak kurang dari 0,5 *bau* atau kira-kira 0,35 ha.

Sebagai akibat dari sangat minimnya areal tanah untuk usaha pertanian, maka timbullah perjanjian bagi hasil. Kebanyakan para penggarap berasal dari kelompok masyarakat pedesaan tingkat rendah yaitu petani *setengah kenceng*, petani *ngindung*, petani *templek* dan petani *tlosor*, sedangkan yang menyewakan

tanah seringkali adalah para pimpinan desa seperti kepala desa, juru tulis desa, kabayan, petugas pengairan. (James C. Scott, 1981).

Sistem bagi hasil yang paling banyak digunakan di Kabupaten Klaten adalah:

- (1) *Sistem maro* (perjanjian bagi hasil dengan perbandingan 1 : 1).
Dalam sistem ini ada beberapa ketentuan antara lain :
 - (a) Para pemilik tanah menerima sejumlah uang sebelum tanah garapan diserahkan kepada para penggarap, yang dalam sistem ini biasa disebut *pemaro*. Selain mendapat uang muka dari penggarap tanah, para pemilik tanah menerima 50% dari hasil panen dari tiap-tiap musim penanaman dan 50% nya lagi untuk penggarap.
 - (b) Para pemilik tanah menerima sewa dalam bentuk hasil bumi sebelum tanah garapan diserahkan kepada penggarap. Selain mendapat sewa dalam bentuk hasil tanah, para pemilik tanah menerima 50% dari hasil panen dari tiap-tiap musim penanaman dan 50% nya lagi untuk penggarap.
 - (c) Pada permulaan sekali, pemilik tanah meminta sebagian tertentu dari hasil kotor panen, biasanya $\frac{1}{8}$ bagian dari penggarap tanah supaya mereka memperoleh hak sepenuhnya atas tanah garapan. Sisa dari bagian yang sudah dikurang $\frac{1}{8}$ bagian dibagi rata antara kedua belah pihak.
- (2) Sistem *mertelu* (perjanjian bagi hasil dengan perbandingan 1 : 2).
Atas penyerahan tanah garapan mereka, para pemilik tanah menerima $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap tanah menerima $\frac{1}{3}$ bagian dari hasil panen.
- (3) Sistem *mrapat* (perjanjian bagi hasil dengan perbandingan 1 : 3).
Tipe perjanjian hasil ini mengikuti cara pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perbandingan 1 : 3. (Werner Roll, 1983).

B. Sejarah Perkembangan PG Gondangwinangun

1. Sejarah Perkebunan Tebu di Indonesia

Industri gula di Indonesia dimulai sejak tahun 1595. Hal ini berdasarkan informasi yang diberitakan oleh seorang yang berkebangsaan Belanda yaitu Cornelis de Houtman yang singgah di Pulau Jawa pada tahun tersebut. Ia menemukan di Banten (Jawa Barat), penduduk telah menjual tebu yang didatangkan dari berbagai daerah yaitu Jakarta, Krawang, Jepara, Timor dan Palembang, kemudian mulailah didirikan unit-unit produksi kecil di daerah-daerah yaitu 80 perusahaan di Jakarta, 11 perusahaan di sepanjang Pantai Utara Jawa, 5 perusahaan di Cirebon dan 4 Perusahaan di Banten. (Mubyarto dan Daryanti, 1991).

Pada mulanya VOC yang berdiri tahun 1602 tidak mencampuri urusan pertanian industri gula di Jawa, VOC mulai mendatangkan gula dari Cina, Taiwan, Benggala, Muangthai dan bila ada kekurangan diambil dari Jawa yang kemudian dijual melalui pelelangan umum di Belanda. Meningkatnya permintaan gula di Eropa, mengakibatkan gula menjadi komoditi dagang yang banyak mendatangkan keuntungan bagi VOC. Hal ini mendorong VOC untuk mengembangkan perkebunan gula Jawa. (Mubyarto dan Daryanti, 1991).

Pada masa tanam paksa, tanaman tebu telah menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian, namun sistem tanam paksa ini mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia, terutama rakyat pedesaan yang miskin. Maka pada tahun 1870 dikeluarkanlah UU Perkebunan Gula atau *Suiker Verband Ordonnantie* yang menetapkan bahwa penanaman tebu secara paksa dihapuskan dan juga ditetapkan UU Budidaya Tebu atau *Wet of Suiker Cultuur* yang mengganti tanam paksa dengan tanam bebas. (Lembaga Pendidikan Perkebunan, 1992). Adanya budidaya tanaman bebas mengakibatkan perkebunan gula mengalami krisis atau hambatan antara lain :

1. Masuknya gula *beet* produksi Eropa dan Amerika pada tahun 1884 mengakibatkan kelebihan penawaran di pasaran dunia, sehingga harga gula merosot.

2. Gula yang dihasilkan PG di Jawa merosot kualitasnya, sehingga kurang mendapat pasaran di luar negeri.
3. Berjangkitnya penyakit *sereh* yang menyebabkan perkebunan gula mengalami kehancuran. Untuk mengatasi hal tersebut, maka didirikanlah lembaga penelitian yang disebut *proefstation*, yaitu suatu lembaga yang bertujuan mengembangkan budidaya tanaman tebu. (Lembaga Pendidikan Perkebunan, 1992).

Dalam perkembangan selanjutnya adanya UU Perkebunan Gula, UU Budidaya Tebu maupun Peraturan Sewa Tanah disertai murahnya harga tanah dan upah buruh, pembangunan jalan kereta api, jalan raya, telekomunikasi dan perkapalan, perkebunan gula di Jawa mengalami kemajuan yang pesat dan mencapai puncaknya pada tahun 1930 di mana Jawa merupakan penghasil gula nomor dua setelah Kuba. (Soemitro Djojohadikusumo, 1972).

2. Sejarah Industri Gula di Jawa

Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 s.d. 1830 yang kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda disebut sebagai “perang Jawa” karena perang hampir terjadi di mana-mana di seluruh Jawa, mengakibatkan kondisi keuangan Belanda sangat memprihatinkan karena untuk membiayai perang. Untuk menghindari kebangkrutan, Jawa diharapkan memberikan hasil yang cukup untuk mengisi kekosongan kas. Van den Bosch hendak memusatkan politik kolonial pada produksi, karena Belanda tidak mempunyai perdagangan, perkapalan, dan pabrik. Pada waktu itu yang diperlukan adalah menggunakan tenaga rakyat untuk penanaman hasil-hasil yang dapat dijual di pasaran dunia. Sistem tanam paksa yang diusulkan Van den Bosch merupakan gabungan antara sistem priyangan dan sistem pajak tanah. Setiap desa diharuskan menanam 1/5 dari tanahnya dengan jenis tanaman yang dapat diekspor dengan mendapatkan kebebasan membayar pajak tanah. (Lembaga Pendidikan Perkebunan, 1992).

Pada tahun 1831 Van den Bosch memerintahkan penanaman nila, gula dan kopi. Sejak tahun 1833 semua kopi diserahkan kepada pemerintah, kelebihan hasil dari yang diwajibkan sebagai pajak harus dijual kepada pemerintah dengan

harga yang telah ditentukan meskipun usaha swasta masih diijinkan berdiri. Sistem tanam paksa berkembang sebagai usaha berskala besar sekali dengan pemerintah sebagai pengusaha dan *Nederlansche Handels Maatschapij (NHM)* sebagai agen tunggal, serta pulau Jawa menjadi suatu tempat usaha yang besar. Untuk membuka Jawa bagi perusahaan swasta dan modal swasta seluas-luasnya, pemerintah Belanda mengadakan peraturan yang pada satu pihak menjamin kepentingan kaum modal usahawan dan di pihak lain kepentingan hak-hak kaum pribumi. Pelaksanaan sistem tanam paksa (*cultuur stelsel*) ini bertujuan untuk memperbaiki perekonomian negeri Belanda yang hampir mengalami kebangkrutan pada saat itu. (Mubyarto dan Daryanti, 1991).

Menurut Proyek Pembinaan Sejarah, Purbakala dan Permuseuman Jawa Tengah (2001), pada pertengahan abad XIX sampai masa perang dunia II industri gula di Indonesia tumbuh dengan pulau Jawa sebagai pusatnya dan menjadi ujung tombak ekonomi dunia. Gula tebu pertama kali diproduksi di sepanjang Pantai Utara Jawa pada abad ke-17. Sistem tanam paksa yang dilakukan pada masa Van den Bosch pada tahun 1830, bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian di Jawa guna memasok komoditi pertanian bagi perdagangan dunia. Dalam hal ini gula dimaksudkan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi ekspansi jaringan gula yang disuplai oleh bahan mentah dari pertanian rakyat sehingga terbentuk menjadi sistem baru. Tebu diperoleh dari hasil tanaman penduduk desa di bawah pengawasan kepala mandor dan pegawai pemerintahan yang juga menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan pada saat musim panen dan pengolahan. Pada masa tahun 1830 dan 1840 pemulihan industri gula dilakukan dengan ekspansi dengan cara dataran rendah di Jawa berada di bawah kekuasaan sistem tanam paksa. Hal ini terkenal dengan sebutan *Oosthoek Residencies of East Java*, di mana industri ini berkembang cepat dengan reputasi produksi yang tinggi sehingga menjadi hal yang menguntungkan bagi perusahaan negara. Produksi gula kemudian berkembang pada pertengahan abad XIX di beberapa tempat di Jawa, meliputi Pasuruan, Probolinggo dan Surabaya di Jawa Timur, seluruh pedalaman di Jawa Tengah sepanjang pantai utara Jawa dari Cirebon sampai Jepara, serta di

Pekalongan dan Tegal. (Proyek Pembinaan Peninggalan Purbakala Sejarah, dan Permuseuman Jawa Tengah, 2001).

3. Sejarah PG Gondangwinangun

Salah satu PG yang berdiri pada awal abad XIX di Jawa adalah PG Gondangwinangun, yang didirikan pada waktu Jawa masih diberlakukan sistem tanam paksa dan berada di Klaten Jawa Tengah. PG Gondangwinangun didirikan pada tahun 1860 oleh NV. *Klatensche Cultuur Maatschapij (KCM)* yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Pada awal berdirinya pengelolaan dilakukan oleh keluarga Jongkhervan der Wijk, kemudian pada tahun 1865 dilakukan oleh NV. *Mirrandolle Voute & Co* yang berkedudukan di Semarang, karena untuk mengelola PG Gondangwinangun dibutuhkan adanya sistem kerja dan struktur organisasi yang baik. Nama Gondangwinangun diambil dari nama kawedanan tempat pabrik didirikan. PG Gondangwinangun terletak 4,5 km di sebelah barat kota Klaten di pinggir jalan raya yang menghubungkan 2 kerajaan besar yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, tepatnya di *Distrik Gondangwinangun, Onderdistric Jogonalan* wilayah karesidenan Surakarta. Sekarang PG Gondangwinangun masuk dalam wilayah Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. (Proyek Pembinaan Peninggalan sejarah, Purbakala dan Permuseuman Jawa Tengah, 2001).

Wilayah kerja PG Gondangwinangun mengalami perkembangan seiring dengan permintaan dan pertambahan kapasitas produksi yang merupakan imbas dari permintaan gula di pasar dunia. Pada tahun 1871 luas wilayah perkebunan hanya 292 *bouws* atau setara dengan 207,2 ha. Pada tahun 1919, dengan bertambahnya permintaan gula di pasaran gula, wilayah kerjanya bertambah menjadi lebih kurang 1201 *bouws* atau sebesar 852,2 ha. Saat itu ada beberapa PG lain yang didirikan di wilayah Karesidenan Surakarta, sehingga kemungkinan terjadi pembagian wilayah kerja. Perkembangan ini seiring dengan masa keemasan gula di Jawa yang terjadi antara tahun 1889 sampai dengan tahun 1929, yaitu sebelum krisis *malaise* 1930 mencapai puncaknya. Krisis *malaise* tahun 1930 mengakibatkan PG Gondangwinangun berhenti produksi dan mulai

berproduksi lagi pada tahun 1935 di bawah administratur Beerman dan M.F.H Bremmers. (Wawancara dengan Bapak Bimo, 12 Nopember 2002).

Pada tahun 1942 Hindia Belanda jatuh ke tangan pemerintah Jepang, sehingga semua peninggalan pemerintah Belanda disita oleh Jepang, termasuk PG Gondangwinangun. Pimpinan perusahaan dipegang oleh orang Jepang bernama Niso dan Inogaki, sementara pimpinan lama, Berman dan M.F.H. Bremmers, didudukkan sebagai penasehat ahli. Selama masa pemerintahan pendudukan Jepang, merupakan malapetaka bagi perindustrian gula. Perkebunan tebu satu demi satu dialihkan kepada penanaman padi dan goni untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang, mesin-mesin dirampas, dibongkar dan dijadikan besi tua. Di wilayah Kabupaten Klaten, ada beberapa PG yang nasibnya sama, seperti : PG Jungkare, PG Manisharjo, PG Taman, PG Randu Gunting, PG Jatinom, PG Wonosari, PG Delanggu dan PG Ceper, hanya PG Gondangwinangun saja yang tidak dirusak, sehingga pabrik tersebut bisa melanjutkan tugasnya menggiling tebu. (Werner Roll, 1983, lihat juga Hardiman Joedo, 1982).

Pada mulanya semua peraturan pengaturan pengelolaan maupun bentuk kesatuan direksi tetap melanjutkan ketentuan lama, namun setelah pendudukan Jepang makin kuat mulai diadakan perubahan-perubahan. Pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh badan usaha Jepang bernama *Taiwan Seiko Kebushiki Keisa*. (Riwayat Singkat PT. Perkebunan XV-XVI (persero) PG. Gondang Baru, 1995).

4. Perkebunan Tebu di Gondangwinangun

Sejarah perkembangan tebu tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme. Perkebunan tebu sebagai perusahaan komersial yang ditujukan untuk komoditi ekspor di pasaran dunia, dikelola oleh maskapai asing dan diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian berskala besar dan kompleks, bersifat padat modal atau *capital intensive*, penggunaan areal pertanian luas, organisasi tenaga kerja besar, penggunaan tenaga kerja upahan atau *wage labour*, penggunaan teknologi modern dan struktur hubungan kerja yang rapi. (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991).

Secara struktural di perkebunan Gondangwinangun terdapat dua lapisan sosial, yaitu lapisan asing dan lapisan pribumi. Golongan pertama menempati jabatan penting dengan pendapatan tinggi, seperti : jabatan pimpinan, staf pengelola, administratur dan tenaga spesialis. Golongan kedua menempati kedudukan sebagai pekerja kasar atau buruh dengan upah yang rendah. (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991).

Untuk golongan yang pertama, masih dibeda-bedakan menurut pengalaman kerja, pengetahuan dan lamanya pengabdian dalam perusahaan. Para asisten muda ada di bawah asisten senior dengan masa kerja 6 tahun lebih, sedang semua asisten ada di bawah *opzicher* (pengawas). Pimpinan umum ada di tangan *administrateur*, yang merupakan jabatan puncak di perkebunan.

Tenaga buruh, yang pada jamannya juga disebut *kuli*, dikelompokkan dalam regu-regu (*ploeg*) yang masing-masing diawasi oleh seorang mandor. Beberapa mandor ada di bawah mandor kepala, sedang mereka semuanya diawasi oleh para asisten dan *opzicher*. (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991).

Daerah perkebunan di Gondangwinangun meliputi tanah-tanah milik para petani di wilayah Kabupaten Klaten yang terbagi menjadi 7 *afdeling*, yaitu Srowot, Joton, Kergan, Gempol, Jiwo, Demangan, dan Gantiwarno. Selain itu juga menyewa tanah di wilayah Semarang, karena sewa tanahnya murah serta tersedianya transportasi yang memadai. Penanaman tebu dilakukan oleh para petani atas perintah Residen Belanda. Perintah tersebut disampaikan kepada para penanam tebu atau petani melalui para kepala desa. Para petani, khususnya petani penggarap yang tidak memiliki tanah, tidak hanya diperintah menanam dan memanen tebu, tetapi juga harus mengolah tebu tersebut. Namun petani pemilik tanah yang telah disewa oleh pihak PG, mereka juga bekerja di perkebunan sebagai tenaga buruh atau kuli dan akan menerima uang sewa yang telah ditentukan oleh pihak PG. Mereka menggarap tanah miliknya yang telah disewa oleh pihak PG dan akan mendapat imbalan atau upah berupa uang yang besarnya telah ditentukan oleh pihak PG dan biasanya sangat minim. Selain uang sewa, petani juga mendapat imbalan berupa gula yang telah jadi. (Wawancara dengan Bapak Tukidjan, 14 Nopember 2002).

5. Bentuk Badan Usaha dan Status PG Gondangwinangun

Pada awal berdirinya pada tahun 1860, PG Gondangwinangun merupakan suatu badan usaha swasta milik Belanda dengan bentuk NV atau *Naamlooze Vennotschap*, maksudnya bahwa PG Gondangwinangun merupakan suatu persekutuan dagang yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya atau dikenal dengan prinsip ekonomi. PG Gondangwinangun mempunyai harta sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pemegang andil (pemegang saham), sehingga harta pemegang andil (pemegang saham) tersebut tidak dapat dituntut untuk menutup kerugian atau hutang dari PG. Dalam pengelolaannya PG Gondangwinangun menjalin hubungan kerja sama yang intensif dengan masyarakat pedesaan di wilayah Kabupaten Klaten yaitu dalam hal sewa tanah dan tenaga kerja melalui perantara para kepala desa. (Wawancara dengan Bapak Tukidjan, 14 Nopember 2002).

6. Struktur Organisasi PG Gondangwinangun

Struktur organisasi adalah suatu susunan yang sistematis dari berbagai bagian dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di dalamnya terjadi hubungan timbal baik antar tiap-tiap anggota organisasi, hubungan antar fungsi, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi yang memikul tiap-tiap pekerjaan.

PG Gondangwinangun dilandasi oleh sistem manajemen yang baik dan juga didukung oleh lokasi pabrik yang strategis, kualitas lahan yang baik, pengairan yang teratur dan tenaga kerja yang mudah didapatkan dari masyarakat sekitar pabrik. (Sartono Kartodirdjo, 1984).

Sistem manajemen perusahaan gula milik Belanda diatur dan dikelola dengan sistem *Directie Administratie*. Pimpinan tertinggi dipegang oleh direksi yang membawahi beberapa perkebunan atau PG, termasuk PG Gondangwinangun yang berada di bawah pimpinan direksi pusat. (R.M.A. Tanumidjaja, 1983). Adapun struktur organisasi PG Gondangwinangun tahun

1930 yang termuat dalam *Adres Boek Voor de Java Suiker Industrie Jaargang Suiker Fabriek Gondang Winangoen* adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a. Administratur | : H. Van den Linden |
| b. Pesuruh Kantor | : C.L. dake |
| c.. Pemegang Buku | : H. Verburgt |
| d. Pembantu pemegang Buku | : Ch.V. Gibson |
| e. Sinder Kebun I : | J.J. Burlage |
| f. Sinder Kebun II | : J. Hoogkamer |
| g. Sinder Kebun III | : G.L.A. Von Winckelman |
| h. Sinder Kebun IV | : W.F. Juch |
| i. Sinder Kebun Percobaan | : Jhr.E.F. Sandberg |
| j. Masinis I | : P.A. Karsdorp |
| k. Masinis II | : C.Chr. Fredriksz |
| l. Masinis III | : J.H. Van Den Brink |
| m. Masinis IV | : A. Oltmans |
| n. Pengiriman Uang | : H.L. Smith |
| o. Ahli Listrik | : V.H. Elzinga |
| p. Kepala Pabrikasi | : H.A. Mac Gillavry |
| q. Pembantu Ahli Kimia I | : J.J. Hoogland |
| r. Pembantu Ahli Kimia II | : J.W. Le Comte |
| s. Kepala Gudang | : J.A. Cephans |
| t. Sinder Tanaman | : E. Van Braam |
| u. Kepala Pengangkutan | : C.J.A. Macpherson |
| v. Mandor | : W.E. De Nys |
| w. Pembantu Mandor I | : J.N. De Vroom |
| x. Pembantu Mandor II | : G.A. Van Braam |
| y. Pembantu Mandor III | : J.M. Portie |
| z. Pengawas Gudang | : J.A.W. Schrader |

Administratur adalah pimpinan pabrik yang bertanggung jawab langsung pada direksi atas semua persoalan yang timbul dalam PG. Selain itu juga mengkoordinir, mengarahkan cara kerja bawahannya dalam melaksanakan tugas

yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, administratur dibantu oleh empat kepala bagian, yaitu :

a. Kepala Bagian Tanaman

Kepala bagian tanaman bertanggung jawab atas tanaman tebu sebagai bahan baku dalam proses produksi, antara lain kualitas tanaman tebu yang meliputi penyediaan bibit, pengelolaan tanah, pemeliharaan tanaman tebu, dan penebangan. Kepala tanaman dibantu oleh beberapa staf yaitu Sinder Kebun, Sinder Kebun Percobaan, Sinder Tanaman, Mandor, dan Pengawas Gudang.

b. Kepala Bagian Pesuruh Kantor

Kepala bagian pesuruh kantor mengelola dan bertanggung jawab atas arus keuangan PG. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa staf dan pegawai pembantu yaitu Pemegang Buku, Pembantu Pemegang Buku dan Pengiriman uang.

c. Kepala Bagian Instalasi

Kepala bagian instalasi bertanggung jawab atas persiapan dan kelancaran jalannya mesin/alat proses, baik perusahaan dalam keadaan giling maupun dalam keadaan perawatan musim. Staf dari Kepala Instalasi yaitu Masinis, Ahli Listrik dan Kepala Pengangkutan.

4. Kepala Bagian Pabrikasi

Kepala bagian pabrikasi bertanggung jawab atas proses pembuatan gula, termasuk juga memantau kualitas gula yang dihasilkan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala pabrikasi dibantu oleh *chemiker* yang bertanggung jawab atas laboratorium dan kelancaran giling. (Wawancara dengan Bapak Bimo, 14 Nopember 2002).

7. Modal PG Gondangwinangun

Salah satu ciri yang menonjol dalam struktur ekonomi Indonesia pada masa kolonial adalah perusahaan-perusahaan besar yang berorientasi ekspor, sehingga modal berada di tangan orang Belanda dan hanya sedikit yang dibiayai dengan modal berasal dari orang Indonesia. (Anne Booth, William J.O' Malley dan Anna Weidenmann, 1988).

PG Gondangwinangun, dalam menjalankan usahanya mendapatkan modal dari *Nederlansche Handel Maatschapij (NHM)* berjumlah f. 37 juta. NHM memberikan pinjaman dengan uang muka kepada pimpinan PG Gondangwinangun sebesar f .10 juta. Pinjaman tersebut untuk membeli alat-alat produksi maupun untuk membiayai pengelolaan lahan tebu, mulai dari tebu itu ditanam, ditebang sampai diolah menjadi gula, sedangkan untuk membiayai perluasan dan perbaikan pabrik, PG Gondangwinangun menggunakan surplus operasional. (Wawancara dengan Bapak Bimo, 14 Nopember 2002).

8. Areal PG Gondangwinangun

Areal sawah yang dipergunakan PG Gondangwinangun diperoleh dengan mengadakan perjanjian sewa-menyewa tanah untuk jangka waktu 21,5 tahun dengan desa-desa di wilayah Kabupaten Klaten. Selain itu juga menyewa areal sawah yang berada di luar Kabupaten Klaten, diantaranya Semarang. Pemilihan daerah Semarang ini karena sewa tanah di wilayah itu sangat murah, selain itu juga didukung oleh adanya sarana transportasi untuk mengangkut tebu dari Semarang ke PG Gondangwinangun. Perjanjian sewa-menyewa itu diadakan langsung antara pimpinan pabrik dengan kepala desa, terutama dengan desa-desa yang terdapat lahan komunal, sehingga PG akan mendapat jaminan diperolehnya tanah yang luas di suatu tempat. (Clifford Geertz, 1983).

Adapun tanah-tanah yang disewakan kepada PG Gondangwinangun di desa-desa di Kabupaten Klaten tahun 1930 –1942, adalah : Joton, Gathak, Wonoboyo, Gereh, Soko, Banyuseng, Besaran, Mipitan, Kadilaju, Kergan, Tambakan, Ngorean, Teluk, Sawahan, Karangnongko, Karangturi, Buker, Kadilanggon, Karangasem, Wetan Pacing, Tegal Sari, Gempol, Jlumbang, Kadibolo, Srago Gede, Gumulan, Gantiwarno, Jetis, Ngemplak, Mojayan, Ngembel, Krajan, Masaran, Baturan, Srowot, Dengkeng, Tanjungan, Jiwo, Tegalrejo, Pasung, Srago Cilik, Tawang Sari, Mlinjon, demangan, Sambu, Bangelan, Jabung Kulon, Gumel, Jomboran, Tengahan, Trotok, Tegalyoso, dan Sabrangan. (*Jaarverslag Bijlagen Deel II Oogstjaar 1930 – 1942: 15*).

Tanah komunal yang disewa oleh PG Gondangwinangun untuk perkebunan tebu, baik tanah sawah maupun tanah tegalan luasnya tidak sama

tergantungan dari luas tanah yang dimiliki desa. Di bawah ini akan ditunjukkan dalam bentuk tabel.

Tabel. 3 Luas areal tanah untuk perkebunan tebu di Kabupaten Klaten tahun 1936 – 1940 (dalam ha)

Tahun	Luas tanah seluruhnya	Luas areal tanah untuk tanaman tebu
1936 - 1937	1.469,00	1.243,50
1937 - 1938	1.463,65	1.174,33
1938 - 1939	1.464,62	1.295,24
1939 - 1940	1.424,35	1.164,17
Jumlah	5.821,62	4.877,24

Sumber : S.F. "Goendangwiangoen" *Jaarverslag Bijlagen Deel Oogstjaar 1936 – 1940*

Tanah komunal yang disewakan itu harus mendapat persetujuan dari semua *gogol* (pemilik hak atas tanah komunal). *Gogol* yang tidak setuju dengan persewaan diberi ganti tanah sawah di luar daerah persewaan yang kadang berada sangat jauh dari tempat *gogol* tersebut. Apabila *gogol* tetap bertahan akan menanam padi di atas tanah bagaiannya, ia tidak akan diberi jatah air karena masalah pengairan menjadi kuasa pemerintah kolonial, akhirnya ia terpaksa menyewakan tanahnya. (Mubyarto, 1992).

9. Tenaga Kerja di PG Gondangwinangun

Syarat utama budidaya tanaman tebu sebagai tanaman yang berorientasi ekspor adalah penyediaan tenaga kerja yang efektif dan banyak jumlahnya. Tenaga kerja yang diperlukan ada beberapa macam, baik yang bekerja di dalam maupun di luar pabrik. Tenaga di dalam pabrik meliputi : teknisi dan tenaga administrasi, sedangkan tenaga kerja di luar pabrik diambil dari penduduk desa yang terdiri dari : para petani, buruh sawah maupun buruh tegalan. (Werner Roll, 1983). Dalam usahanya untuk memperoleh tenaga kerja, PG Gondangwinangun melakukan beberapa kebijaksanaan, antara lain :

1. Pada permulaan abad-19, desa ditunjuk sebagai unit yang menyediakan serta menyalurkan pelayanan kerja paksa melalui perantaraan kepala desa, sehingga tenaga kerja bekerja di bawah perintah dari kepala desa.
2. Dengan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan permintaan tenaga kerja meningkat, sehingga pihak pabrik tidak lagi membutuhkan pejabat perantara karena tenaga kerja mau bekerja di perkebunan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Perubahan kebijaksanaan ini tidak berarti meningkatnya penghasilan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya, sebab upah yang dibayar oleh perusahaan kepada tenaga kerja tetap rendah. Perkebunan tetap bertahan menggunakan kebijaksanaan upah rendah dengan alasan bahwa tenaga kerja tidak merespons secara positif terhadap meningkatnya upah.
3. Sistem perpajakan, yang semula pajak dapat dibayar oleh para petani dalam bentuk *natura* atau dalam bentuk berbagai *heerendiensten* atau kerja wajib, diubah dengan cara mengharuskan para petani untuk membayar pajak dengan uang tunai. Peraturan pajak baru ini benar-benar berhasil menimbulkan kebutuhan akan uang tunai dalam masyarakat pedesaan dan salah satu sumber untuk memperoleh uang tunai adalah di perkebunan.

Tenaga kerja yang ada di PG Gondangwinangun terdiri dari tenaga kerja tetap (pegawai/karyawan tetap) dan tenaga tidak tetap, yang terdiri dari tenaga musiman dan tenaga borongan, yang masing-masing dengan corak ragam dan kegiatan yang berbeda. Tenaga kerja tetap terdiri dari pegawai/karyawan tetap di bidang tanaman yang pada umumnya telah terangkum dalam struktur organisasi dan personalia perusahaan. Tenaga tetap yang ada di PG Gondangwinangun tahun 1930 sebanyak 27 orang yang semuanya berkebangsaan Belanda. (Wawancara dengan Bapak Tukidjan, 14 Nopember 2002).

Tenaga kerja musiman adalah pegawai yang hanya bekerja dalam musim giling (*kampanye*). Kegiatan yang dilakukan adalah penyelenggaraan tebang dan angkutan, termasuk pemeliharaan lori. Sedangkan tenaga borongan di bidang tanaman meliputi tenaga kerja borongan untuk berbagai kegiatan kebun yang diselenggarakan PG seperti penyelenggaraan kebun tebu (yang meliputi tebu

sendiri, kebun bibit), panen, angkutan, dan pekerjaan-pekerjaan penunjang lainnya.

C. Pengaruh Krisis Malaise Bagi PG Gondangwinangun

1. Awal terjadinya Krisis Malaise

Krisis *malaise* adalah krisis yang terjadi pada tahun 1929 dan melanda hampir semua negara di dunia. Istilah *malaise* di sini hanya dikenal di wilayah Hindia Belanda sedangkan yang dipakai di dunia dikenal dengan nama *depresi ekonomi*. Menurut Muh. Ma'rufin Sudibyo dalam princesspml@hotmail.com, bahwa di dekade 30-an, dunia dihantam dengan krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah peradaban manusia, yang dikenal dengan zaman *malaise*. Krisis yang berawal dari amblesnya harga-harga saham di bursa Wall Street, berujung pada rontoknya 80 juta dollar kekayaan hanya dalam beberapa hari. Menurut Sartono Kartodirdjo (1993), krisis *malaise* ditandai dengan adanya pengurangan tenaga kerja, pemotongan gaji, turunnya harga-harga hasil pertanian serta rendahnya upah.

Krisis *malaise* berawal di negara Amerika Serikat pada 24 Oktober 1929. Pada saat itu Amerika Serikat merupakan produsen utama di bidang pertanian dan industri, baik sebelum maupun semasa perang. Sebab umum terjadinya *malaise* menurut Yudana (1989), adalah akibat-akibat yang ditimbulkan dari Perang Dunia I, dalam hal ini bidang ekonomi. Barang-barang produksi Amerika Serikat banyak yang diekspor ke negara-negara Eropa, tetapi karena adanya politik isolasi yang ketat oleh negara totaliter di Eropa, seperti Fasis-Italia (1922), Nazi-Hitler, barang-barang produksi Amerika Serikat tidak laku atau mengalami penumpukkan di gudang-gudang. Akibatnya adalah terjadinya pengangguran, jatuhnya harga barang-barang ekspor dan meningkatnya kejahatan. Sedangkan menurut Hersri Setiawan dalam www.megaforpresident.org/bk/hutbk-4htm, bahwa krisis tahun 30-an dimulai dengan krisis kronis yang terjadi di lapangan pertanian di Amerika Serikat dan Eropa Barat, dan kemudian dibarengi dengan krisis di lapangan industri.

Akibat krisis ini juga melanda negara-negara di belahan dunia yang lain. Di Eropa Barat contohnya di Inggris, banyak pabrik dan bank yang mengalami kebangkrutan. Berjuta-juta orang kehilangan pekerjaan dan menjadi penganggur. Gelombang pasang perekonomian di tahun 1920-an, baik dalam barang-barang, pabrik-pabrik, perumahan, bahkan penanaman modal pun, terus-menerus mengalami kemerosotan sampai pada titik yang terendah. Para petani, konsumen, penanam modal menanggung hutang yang besar. Spekulasi saham yang besar-besaran dalam pusat-pusat keuangan internasional terutama di Wall Street New York dan Bursa di London, juga turut mengacaukan keseimbangan ekonomi. (William J.O'Malley, 1983).

Krisis *malaise* juga melanda Hindia Belanda yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Menurut John A Garraty yang dikutip oleh Swantoro (2002) dalam www.kompas.com/kompas-cetak/0204/21/seni/tinj05.htm, *malaise* diawali dengan meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah 18 Desember 1930. Tidak kurang 1500 orang tewas, 2500 hewan mati. Berhektar-hektar sawah ladang hancur, dan ratusan rumah terbakar atau roboh.

Menurut D.H. Burger (1970), Indonesia saat itu bukan merupakan penghasil barang-barang industri namun hanya barang-barang pokok, terutama yang berasal dari pertanian, yaitu bahan makanan (umpamanya beras, gula, kopi, teh) dan bahan mentah (umpamanya karet dan minyak bumi). Indonesia juga bukan termasuk dalam daerah-daerah industri yang dalam tahun 1930 terdiri dari Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang dan Rusia, namun tergolong daerah agraris, yang pada waktu itu dapat dikatakan meliputi bagian dunia yang lain. Selanjutnya D.H. Burger (1970:202) menambahkan :

Bagi daerah-daerah agraris seperti Indonesia, dia menyebabkan suatu kemunduran harga yang bersifat bentjana kemunduran mana bagi hasil-hasil agraris djauh lebih mendalam dari pada barang-barang industri serta menimbulkan persediaan-persediaan besar yang tidak terjual, sedangkan djumlah produksi sendiri dapat dikatakan tidak berkurang. Dengan demikian, maka bagi Indonesia sebagai daerah agraris serta penghasil bahan mentah depresi itu telah menimbulkan suatu kedjatuhan harga yang amat merusak serta penumpukkan persediaan-persediaan yang tidak dapat dijual seperti gula, karet, dan timah.

2. Situasi Umum di Hindia Belanda pada Masa *Malaise*

Bagi Hindia Belanda *malaise* memang tidak bisa dihindarkan, mengingat bentuk perekonomian Hindia Belanda bersifat terbuka sejak tahun 1870, sehingga maju mundurnya perekonomian tergantung kepada perekonomian dunia. Makin berkembangnya perekonomian dunia terutama sejak awal abad ke 20 dan pasca Perang Dunia I, mengakibatkan permintaan barang-barang mentah Hindia Belanda makin meningkat di pasar dunia. Sebaliknya depresi ekonomi 1930-an telah melumpuhkan perekonomian secara keseluruhan. Zaman seperti itu bagi masyarakat di Hindia Belanda disebut dengan zaman *malaise* atau zaman *meleset*, yaitu suatu zaman yang tak lagi berjalan sebagaimana mestinya, seperti terjadinya pemotongan gaji, pengurangan kesempatan kerja, turunnya harga-harga pertanian secara drastis dan rendahnya upah, yang telah membawa akibat yang serius bagi kegiatan ekonomi di seluruh Hindia Belanda. (Moh. Hatta, 1935, lihat juga Sartono Kartodirdjo, 1990).

Hindia Belanda yang terlibat dalam jaringan perdagangan internasional tidak mampu mengelak dari tekanan-tekanan ketidak seimbangan itu. Secara umum *malaise* 30-an di Hindia Belanda dipengaruhi oleh dua faktor keadaan yang saling berkaitan yaitu perekonomian dunia dan kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Adanya kelesuan di pasar dunia terutama kepentingan bahan mentah menyebabkan perekonomian Hindia Belanda berada pada posisi sulit, terutama karena negara ini mengandalkan devisa dari ekspor bahan mentah (pertanian). Kondisi ini dipertajam dengan berbagai persoalan ekonomi yang bila ditelaah terakumulasi dalam tiga persoalan yaitu *Over Productie*, *Onder Consumtie*, dan *Crediet Expansie*.

Overproductie yaitu produksi yang berlebihan. Hal ini terjadi, sebab pokok kapital yang besar telah mengeluarkan produksi yang berlebihan dengan cara lebih mengintensifkan penanaman dan perluasan areal baru. Kondisi yang demikian disertai dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri tersebut. Di sisi lain kebutuhan masyarakat akan uang tunai menjadi dorongan utama untuk beralih sektor pada kerja baru yang cepat mendatangkan

uang dan secara perlahan-lahan sektor pertanian *subsistensi* kekurangan tenaga kerja. Akibatnya adalah ketika terjadi kelesuan pasar dunia timbul produksi yang menumpuk tidak terjual akibatnya terjadi *concurrentie* atau persaingan dan politik *dumping*. Akibat langsung dari tindakan ini adalah penurunan gaji buruh dengan harapan pemilik modal tetap untung. Bila kondisi pasar tidak berubah tindakan selanjutnya adalah pembatasan produksi disertai dengan pengurangan tenaga kerja.

Onder consumtie yaitu pemakaian barang di bawah standar. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan pemakaian produksi oleh masyarakat secara keseluruhan. Selain itu juga diakibatkan karena besarnya cukai bagi pemasukan dan pengeluaran barang, beratnya pajak (*belasting*) yang dibebankan langsung dan beban sosial (*sosiale lasten*) seperti pensiunan dan dana sosial lain yang harus dibayar oleh pemodal. Hal seperti ini yang membuat biaya produksi naik dan harga produksi barang menjadi mahal. Pada akhirnya masyarakat bawah tidak mampu untuk menikmatinya.

Crediet expansie yaitu pemberian kredit yang longgar dan persyaratannya kurang ketat menyebabkan Undang-undang Bank yang membatasi berbagai pengeluaran uang tak mampu mencegah terjadinya ekspansi kredit. Kondisi yang berlarut-larut akan menimbulkan inflasi yang hebat akibat kredit yang sudah dikeluarkan sudah terlalu besar dan sulit dikontrol. Kejadian seperti ini akibat para bankir dalam memberikan kredit kurang mengindahkan UU perbankan. Ekspansi kredit yang berlebihan ini membuat terjadinya *over productie* karena mudahnya mendapatkan modal yang menjadikan para pengusaha mengadakan perluasan usahanya. Dengan melihat ketiga hal di atas jelaslah rakyat yang menjadi korban dan berakibat timbulnya kemiskinan rakyat (*massa verarming*). (J.H. Boeke, 1947).

Kondisi seperti ini masih ditambah dengan kebijaksanaan moneter yang diambil pemerintah kolonial Belanda berbeda dengan negara-negara kapitalis yang lain, seperti : Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan negara-negara Skandinavia yang melakukan *devaluasi*, yaitu kebijaksanaan untuk menurunkan nilai mata uang. Kebijakan *devaluasi* diharapkan dapat mengangkat

kemerosotan nilai mata uang. Hasilnya negara-negara yang menjalankan kebijakan tersebut biaya hidup tidak banyak mengalami perubahan walau harga barang-barang naik. (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991). Belanda menjalankan kebijakan moneternya dengan “penekanan” ke dalam (*deflasi*). Kebijakan *deflasi* ini mengakibatkan berbagai kesulitan dan kerugian. Kebijakan ini diikuti dengan menurunkan tingkat upah/gaji, mengadakan pajak-pajak baru, menurunkan berbagai tarif. Sudah tentu kebijakan yang diambil berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi di Hindia Belanda.

Para kapitalis berusaha mengadakan efisiensi dan mengefektifkan perusahaannya agar, meskipun situasi mengalami kelesuan, harga produksi turun dan makin kerasnya persaingan, tidak terjadi penghentian produksi, minimal selama masa *malaise* dan berharap akan bangkit kembali sesudah itu. Untuk itu diadakan berbagai *restriksi* yang berkenaan langsung dengan perusahaan. Dari semua pembatasan yang dikenakan terhadap sektor industri, hanya industri gula yang dikurangi areal produksinya secara drastis. Hal ini berakibat fatal bagi industri gula. Diantara 175 PG yang ada pada tahun 1925, 77 di antaranya terpaksa tutup atau digabung dengan yang lain saat terjadi *malaise*. (Peter Creuzberg & Van Laanen, 1987). Harga gula terus merosot. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 4 Harga Gula Semasa Krisis, Tahun 1929 - 1933

Tahun	Harga/ Kwintal
1929	f. 13,66 / Kwintal
1931	f. 8,06 / Kwintal
1933	f. 5,66 / Kwintal

Sumber : *Kolonial Verslag 1930*

Menghadapi kondisi ini pemerintah kolonial Hindia Belanda berusaha mencari pasaran baru, tetapi karena masing-masing negara mengadakan *restriksi* sehingga sulit untuk menembusnya apalagi situasi perekonomian sedang mengalami kelesuan. Sebagai solusi dengan adanya *restriksi*, pemerintah Hindia Belanda mengubah orientasi perdagangannya, yaitu dari orientasi pasar luar negeri ke pasar dalam negeri. Tetapi karena rendahnya daya beli masyarakat,

sehingga tingkat konsumsi terhadap komoditas-komoditas tersebut rendah. Pasar dalam negeri belum mampu menyerap berbagai produksi perkebunan. Hal ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel. 5 Industri Perkebunan/Pertambangan Tahun 1930
Pasar Dalam Negeri

Jenis Perusahaan	Jumlah Pabrik	Produksi/ton	Konsumsi Dalam Negeri
Gula	179	1.500.00	35%
Padi	1137	1.200.00	90%
Teh	273	128.881	30%
Karet	193	421.000	3%
Kopi	89	120.000	50%
Tapioka	220	223.000	37%
Minyak Tumbuhan	113	263.178	70%
Minyak Kayu Putih	100	5.193	5%
Kayu	103	118.000	90%
Minyak Tanah	-	7.036.000	18%
Garam	-	160.000	100%

Sumber : D.H. Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia II* : 192

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa padi, garam, minyak nabati dan kayu menduduki tempat teratas mengingat ketiganya merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Sementara di luar itu, konsumsi masyarakat terhadap produksi perkebunan rendah, mengingat untuk memenuhi kebutuhan pokok saja amat sulit, apalagi untuk mengkonsumsi kebutuhan di luar itu. Perlu diingat bahwa produksi perkebunan merupakan andalan ekspor Hindia Belanda, oleh karena itu produksi perkebunan diupayakan untuk terus ditingkatkan dan dipertahankan.

Bagi rakyat Indonesia yang mayoritas hidupnya dari sektor pertanian, berdasarkan sensus penduduk tahun 1930, jumlah penduduk Indonesia ada 60,7 juta jiwa. Dari jumlah itu 41,7 juta tinggal di Jawa sedangkan 19 juta lainnya

tinggal di luar Jawa. Dari jumlah tersebut ada 14.020.000 (67,7%) bekerja di sektor pertanian, 2.105.000 (10,6%) di sektor kerajinan, sektor perdagangan ada 1.293.000 (6,2%), transportasi 291.000 (1,5%), pertambangan ada 96.000 (0,7%), sektor jasa ada 978.000 (4,9%), lain-lain ada 1.698.000 (8,4%). Hal ini berarti sektor pertanian memegang peranan pokok dalam perekonomian penduduk Hindia Belanda. Sebagai negara agraris, struktur produksi Hindia Belanda terdiri dari produksi bahan mentah dan makanan. Sebagian besar penghasilan masyarakat berasal dari sektor pertanian (67,7%), yang merupakan bagian dari sektor produksi primer yang lain yaitu kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Sebagian terkonsentrasi di sektor primer sebab faktor-faktor produksi, tanah, dan tenaga kerja relatif banyak. Sesuai dengan manfaat komparatif dan biaya komparatif, Hindia Belanda sebagai negara jajahan lebih banyak menghasilkan barang-barang yang menggunakan lebih banyak tenaga kerja. Ketika datang badai *malaise*, sektor pertanianlah yang sangat terpukul mengingat menurun drastisnya harga-harga produksi pertanian. Hal ini jelas memukul kehidupan ekonomi pedesaan ke tingkat yang sangat rendah karena mengingat sebagian besar penduduknya bersandar dari sektor pertanian tersebut. (Widjojo Nitisastro, 1970).

Bagi industri perkebunan, termasuk perkebunan tebu, krisis ini sangat memukul dan membawa dampak yang mendalam. Menurut Lembaga Pendidikan Perkebunan (1992), *malaise* yang terjadi tahun 1930 sampai tahun 1935 menyebabkan industri gula di Indonesia terpukul. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya produksi gula di beberapa negara yang biasanya mengimpor gula, seperti India, menurunnya impor gula oleh Inggris, Cina dan Jepang, yang memasang tarif bea impor gula yang tinggi dan masuknya gula dari tempat lain, yaitu Formosa (Taiwan). Sebetulnya pada tahun 1931 para produsen gula masuk ke dalam persetujuan *Chadbourne Plan*, yang menetapkan kuota ekspor masing-masing, tetapi karena tidak memberikan keuntungan akhirnya mereka menarik diri. Akibatnya stok gula yang tak dapat dijual menumpuk sampai 6,3 juta ton, sehingga harga gula jatuh. (Lembaga Pendidikan Perkebunan, 1992). Adanya kelesuan di pasar dunia terutama kepentingan bahan mentah menyebabkan perekonomian Hindia Belanda dalam posisi sulit, karena Hindia Belanda

mengandalkan devisa negara dari ekspor bahan mentah (pertanian). Situasi perkembangan ekspor dan impor Hindia Belanda pada masa-masa krisis dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 6 Perkembangan Ekspor dan Impor Hindia Belanda
Pada masa-masa krisis

Tahun	1929	1931	1933	1935	1936
Ekspor	100	54	39	33	32
Impor	100	73	52	47	47

Sumber : Gonggrijp, 1938

Dari tabel di atas nampak bahwa nilai ekspor dari Hindia Belanda dari tahun ke tahun terus menurun secara drastis. Hal ini dikarenakan adanya kesukaran dalam mencari daerah ekspor baru, bahkan muncul negeri-negeri produsen baru untuk komoditi yang sebelumnya dikuasai Hindia Belanda pemasarannya. Contoh yang jelas dalam hal ini menurut Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991) adalah komoditi utama dari Hindia Belanda, yaitu gula. Apabila pada umumnya ekspor turun 50 sampai 60 persen, untuk produksi dan ekspor gula keadannya sangat parah. Produksi gula di Jawa pada tahun 1929 ialah 2.935.317 ton, pada tahun 1935 merosot menjadi 513.554 ton. Oleh karena kedudukan komoditi gula menduduki tempat teratas di antara komoditi perkebunan yang lain, maka pukulan yang paling terasa juga ada dalam industri gula. Di bawah ini akan diberikan gambaran angka-angka mengenai produksi serta harga gula selama 1913-1934.

Tabel. 7 Produksi dan Nilai Ekspor Gula tahun 1913-1934

Tahun	Jumlah Pabrik Gula	Areal (ha)	Volume (ton)	Ekspor (ton)	Ekspor (ribuan <i>gulden</i>)	Harga per kwintal (<i>gulden</i>)
1913	-	-	-	-	-	12,59
1928	-	-	-	-	-	14,61
1929	-	-	-	-	-	13,66
1930	179	193.692	2.915.866	-	-	9,60
1931	178	195.869	2.772.443	1.864.865	129.340	8,06
1932	165	162.231	2.560.182	1.888.004	99.254	6,28
1933	116	82.679	1.372.585	1.389.008	62.127	5,66

1934	54	3.402	636.104	1.388.460	45.462	5,61
------	----	-------	---------	-----------	--------	------

Sumber : Rutgers, J. & A. Huber, 1937, *Indonesia*, Vol. 2, Amsterdam

Dari tabel di atas jelas bahwa sejak 1930 semuanya mengalami penurunan, mulai dari jumlah pabrik gula, areal kebun tebu, volume produksi dan nilai penghasilannya. Dapat disimpulkan bahwa rakyat turut menderita kerugian oleh karena berkurangnya sewa tanah, upah buruh dan pembayaran berbagai pelayanan. Menurut William J.O'Malley (1983), reaksi langsung industri gula terhadap melemahnya permintaan di pasaran bebas sebagai akibat *malaise* adalah normal, yaitu pengurangan produksi dan upaya penekanan biaya per satuan barang yang masih diproduksi.

Menurut Egbert De Vries (1985), depresi ekonomi (*malaise*) yang terjadi pada tahun 1930, mempunyai pengaruh terhadap struktur sosial dan ekonomi di Hindia Belanda. Pada musim tanam 1931 sampai dengan tahun 1932 terpaksa kuota produksi tanaman niaga untuk ekspor diturunkan. Akibat yang lebih parah adalah di sektor ketenagakerjaan. Di Industri gula, terjadi pengurangan tenaga kerja sebesar 131.700 orang pada tahun 1929. Pada tahun 1930 sebanyak 97.100 orang dan pada tahun 1934 tinggal 28.600 orang. Dengan demikian pengurangan tenaga kerja sebanyak 78% antara tahun 1929 sampai tahun 1934. Kondisi ini menyebabkan timbulnya pengangguran yang tak terhindarkan. Banyak buruh yang terpaksa kembali ke desa akibat *rasionalisasi*, sehingga menambah beban berat terhadap pasaran kerja yang tak terkendali selama *malaise*. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat upah dan perputaran usaha di Jawa, yang pada umumnya menurun lebih tajam dibanding tingkat konjungtur ekonomi.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1989), mengingat pentingnya posisi budidaya tebu di pulau Jawa, maka kemunduran parah yang dialami cabang usaha ini sesudah tahun 1930 tentunya menimbulkan akibat-akibat yang besar bagi kesejahteraan penduduk. Besarnya penghasilan penduduk dari industri gula dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 8 Perkembangan Penghasilan Penduduk dari Industri Gula di Jawa (dalam ribuan *gulden*)

Tahun	Bagian	Dari th	Sewa	Dari th	Setoran	Dari th
-------	--------	---------	------	---------	---------	---------

	Upah	1928 (dalam %)	Tanah	1928 (dalam %)	Tebu	1928 (dalam %)
1928	106.268	100	22.868	100	5.008	100
1929	101.827	96	23.915	105	3.918	78
1930	97.866	92	25.044	110	2.986	60
1931	93.978	79	25.026	109	2.207	44
1932	53.077	50	21.703	95	911	18
1933	21.866	20	11.854	52	384	8
1934	9.712	9	6.526	29	189	4
1935	7.270	7	3.989	17	233	5
1936	7.517	7	3.183	14	244	5

Sumber : *De Economist, 1938*

Dalam ketiga kategori keterlibatan penduduk yang diperlihatkan dalam tabel di atas, yaitu bagian upah, sewa tanah dan setoran tebu, nampak bahwa ada penurunan jumlah yang besar. Dari penurunan jumlah upah (dalam tahun 1936 tinggal 7 % saja dari jumlah untuk 1928), dapat disimpulkan besarnya penyusutan kesempatan kerja maupun penurunan tingkat upah.

Dalam situasi sulit dan rendahnya harga-harga pertanian menyebabkan berkurangnya pendapatan petani. Oleh karena itu rakyat menyebutnya sebagai *meleset* mengingat kondisi perekonomian berjalan tak sesuai dengan yang semestinya, seperti terjadinya pengurangan kesempatan kerja, pemotongan upah/gaji, turunnya harga produksi pertanian dan rendahnya upah. Itu semua akibat politik ekonomi yang dijalankan pemerintah pada satu pihak menjalankan penghematan secara besar-besaran, di lain pihak hendak mempertahankan pendapatan dari ekspor hasil-hasil perkebunan. Sementara beban pajak dan kebutuhan lain relatif besar. Hal ini membuat kondisi petani makin terpuruk.

3. Pengaruh Krisis *Malaise* terhadap PG Gondangwinangun

Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya *malaise* bagi PG Gondangwinangun adalah dalam hal produksi gula, tenaga kerja, dan tingkat upah. Sebelum *malaise*, produksi gula PG Gondangwinangun mengalami perkembangan yang cepat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 9 Produksi Gula PG Gondangwinangun tahun 1925-1929

Tahun	Produksi (kwt/ ha)
1925	1135

1926	1153
1927	1219
1928	1337
1929	1380

Disarikan dari : *Proefstation Voor De Java-Suikerindustrie, Mededeelingen Jaargang: 1926, 1927, 1928, 1929, 1930*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa produksi gula PG Gondangwinangun dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat cepat. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pemanfaatan tenaga mesin serta teknologi modern dalam proses produksi gula. Selain itu juga dipengaruhi oleh penerapan sistem penanaman tebu dari Kuba yaitu sistem *Reynoso*. Memasuki tahun 1930-an, kondisi ini berubah drastis karena terjadinya krisis *malaise*. Bagi PG Gondangwinangun sendiri, akibat dari krisis *malaise* sangat jelas yaitu terhentinya produksi gula mulai tahun 1930 sampai tahun 1935, sehingga produksi gula dalam posisi nol.

Setelah krisis *malaise* berakhir tahun 1935, PG Gondangwinangun mulai memproduksi gula kembali tahun 1936 dan puncak dari perkembangan hasil produksi gula Gondangwinangun dicapai pada tahun 1940, di mana PG Gondangwinangun dapat menghasilkan produksi gula 2237 kwt/ha, sedangkan luas areal seluruhnya pada tahun 1940 adalah 1.164,2 ha. (Wawancara dengan Bapak Tukidjan, 14 Nopember 2002). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 10 Produksi Gula PG Gondangwinangun tahun 1936-1940

Tahun	Produksi (kwt/ha)
1936	1434
1937	1447
1938	1604
1939	2010
1940	2237

Disarikan dari : *Proefstation Voor De Java-Suikerindustrie, Mededeelingen Jaargang : 1937, 1938, 1939, 1940, 1941*

Keberhasilan itu didukung oleh beberapa hal, antara lain :

1. Penggunaan bibit tebu unggul sehingga tahan terhadap penyakit, yaitu jenis M442-51 (B2148).

2. Menggunakan lokomotif uap kuno buatan Racher dan Rueb Breda, Nederland pada tahun 1889 dengan nama “loko simbah” dan lokomotif buatan pabrik Linke Hofmann Werke, Bralan, Deutchland, sehingga dapat mengangkut tebu ke pabrik dengan cepat.
3. Mesin-mesin PG Gondangwinangun hampir keseluruhannya menggunakan tenaga uap, sehingga dapat menghasilkan produksi gula kualitas prima. (Suara Merdeka, 16 Pebruari 1991).

Faktor lain yang juga mempengaruhi perkembangan produksi gula di PG Gondangwinangun adalah diterapkannya sistem penanaman tebu yang disebut sistem *Reynoso* yang merupakan sistem penanaman tebu dari Kuba. Sistem *reynoso* adalah sistem penanaman tebu dengan cara membuat parit-parit/got, yang berguna sebagai saluran irigasi dan sebagai sarana untuk memudahkan dalam perawatan tanaman tebu. Juga dalam sistem ini, tidak seluruh lahan diolah, hanya pada tempat tertentu yang diolah dengan cara membuat *juringan* /lubang tanaman. Di *juringan* /lubang tanaman itulah bibit tebu ditanam. Tanaman tebu yang ditanam saat itu adalah jenis M 442-51 (B2148), yang merupakan jenis unggul karena jumlah batangnya mencapai 62.000-87.000 per hektar. (Wawancara dengan Bapak Tukidjan, 14 Nopember 2002).

Akibat krisis *malaise* bagi PG Gondangwinangun di bidang tenaga kerja adalah terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja, khususnya untuk tenaga tetap yang terdiri dari tenaga borongan dan tenaga musiman. Saat berhentinya proses produksi sejak tahun 1930-1935, tenaga kerja yang bekerja di PG Gondangwinangun dikurangi dari 57.000 orang pada masa sebelum krisis, menjadi 23.940 orang pada tahun 1936. Sedangkan untuk tenaga tetap yang berjumlah 27 orang pada masa sebelum krisis, dikurangi menjadi 11 orang pada tahun 1936. Walaupun di kalangan pegawai administrasi dan pengawas diadakan pengurangan sebanyak 42, namun jumlah mereka hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari keseluruhan tenaga kerja yang ada di PG Gondangwinangun yang berjumlah 57.000 orang. Pengurangan ini dilakukan sebagai langkah untuk efisiensi biaya produksi, karena baru saja keluar dari krisis *malaise*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 11 Kondisi Tenaga Kerja di PG Gondangwinangun Sebelum dan Sesudah Krisis

Kategori Tenaga	Sebelum krisis	Dalam Tahun 1936
Tenaga Tetap	27 orang	11 orang
Tenaga Tidak Tetap (tenaga musiman dan tenaga borongan)	57.000 orang	23.940 orang

Sumber : Riwayat Singkat PT. Perkebunan XV-XVI (persero) PG. Gondang Baru, 1995.

Dengan dikurangnya jumlah tenaga kerja di PG Gondangwinangun, akibat yang sangat dirasakan adalah berkurangnya penghasilan yang didapatkan oleh rakyat pedesaan. Bagi petani yang memiliki tanah penghasilan ini didapatkan dari uang sewa tanah oleh pihak PG Gondangwinangun dan juga dari upah sebagai buruh atau *kuli*. Setelah disewa oleh pihak PG Gondangwinangun, para petani yang memiliki tanah, juga bekerja sebagai buruh atau *kuli* di PG. Sedangkan bagi petani yang miskin, mereka mendapatkan penghasilan dari upah sebagai buruh atau *kuli*. Sehingga dengan ditutupnya PG Gondangwinangun pada tahun 1930 sampai tahun 1935, rakyat pedesaan kehilangan salah satu sumber pendapatan sampingan selain sebagai petani. Yang jelas bahwa saat terjadinya krisis itu, terjadi pengangguran yang sangat besar dan hal ini dilihat dari segi ekonomi dan sosial, sangat merugikan rakyat pedesaan, terutama mereka yang sangat menggantungkan pendapatannya pada PG Gondangwinangun. (Wawancara dengan Bapak Tukidjan , 15 Nopember 2002).

Krisis *malaise* juga berpengaruh terhadap tingkat upah yang diterima oleh para pekerja PG Gondangwinangun. Upah yang diterima pada masa sebelum krisis turun setelah terjadinya krisis. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 12 Penurunan Tingkat Upah di PG Gondangwinangun Masa Sebelum krisis dan Sesudah Krisis

	Sebelum Krisis	Dalam Tahun 1936
<i>Kuli</i> di Kebun (Per hari)	40-45 <i>sen</i>	10-14 <i>sen</i>
<i>Kuli</i> Harian di Pabrik	25-35 <i>sen</i>	10 <i>sen</i>

(Per hari)		
-------------	--	--

Sumber : Riwayat Singkat PT. Perkebunan XV-XVI (Persero) PG Gondang Baru, 1995

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa upah terkecil sudah melebihi 50%. Bagi para petani yang bekerja di PG Gondangwinangun sebagai tenaga buruh, kondisi ini berarti terjadinya penurunan penghasilan yang berarti pula terjadi penurunan kemampuan membeli kebutuhan pokok.

Setelah jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1942, PG Gondangwinangun berada di bawah pengelolaan bangsa Jepang. Sesudah depresi ekonomi mereda, usaha untuk menaikkan produksi gula dilaksanakan lagi antara lain melalui perluasan areal tanaman serta penggunaan bibit unggul. Namun selama pendudukan Jepang, areal tebu dikurangi lagi sampai separuh dari keadaan menjelang perang. Jepang tidak mendorong penanaman tebu, tetapi sebagian lahan dipergunakan untuk menanam padi atau tanaman pangan lainnya. Perbedaan kebijaksanaan antara pemerintah Hindia Belanda yang mengutamakan penanaman tanaman untuk produksi ekspor dalam politik pertaniannya, dengan Jepang yang mementingkan peningkatan produksi tanaman pangan untuk mendukung perangnya, mengakibatkan industri gula mengalami kehancuran kembali. (Edisi Khusus Bank Bumi Daya, 1983).

Nasib PG Gondangwinangun dan juga perusahaan perkebunan yang sempat jaya di masa kekuasaan Belanda, agak terbengkalai. Hal ini karena kebijakan dari pemerintahan Jepang yang lebih mementingkan penanaman produk pertanian guna mendukung perang, seperti penanaman padi, penanaman pohon *jarak* yang berguna untuk bahan minyak bagi kendaraan militer Jepang, sehingga penanaman tebu terhenti dan akibatnya adalah PG Gondangwinangun tidak berjalan produksinya. (Wawancara dengan Bapak Tukidjan, 20 Nopember 2002).

D. Pengaruh Krisis *Malaise* bagi kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Klaten

Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya krisis *malaise* tahun 1930-an memang sangat luas. Hal ini karena krisis ini merupakan krisis global yang

melanda hampir semua negara di dunia. Bagi negara-negara miskin akan sumber daya alam, *malaise* sangat memukul perekonomian mereka. Bagi negara yang kaya sumber daya alam, termasuk Hindia Belanda, krisis *malaise* juga sangat dirasakan akibatnya, yang bisa dilihat dari ditutupnya pabrik-pabrik yang mengolah hasil pertanian yang ada di Jawa, seperti PG Gondangwinangun, karena terjadinya penumpukan gula yang ada di gudang karena tidak dapat dijual dengan harga yang sesuai. Gula dari PG Gondangwinangun banyak diekspor ke negara-negara Asia antara lain India, Cina, dan Jepang. Menurut William J.O'Malley (1983), masalah yang dihadapi di masa *malaise* bukanlah rendahnya harga, melainkan : gula dalam jumlah yang besar tidak dapat dijual dengan harga yang sesuai akibat jatuhnya harga-harga produk pertanian di pasaran dunia. Kondisi seperti inilah yang dialami oleh PG Gondangwinangun Klaten pada masa-masa krisis.

Bagi penduduk pedesaan, terutama petani yang miskin dan tidak memiliki tanah, telah kehilangan bagian yang amat besar dari penghasilan tambahan yang mereka peroleh. Dengan ditutupnya PG Gondangwinangun, maka petani yang bekerja di PG mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Hal ini terjadi karena terjadinya kelangkaan uang yang disebabkan tidak sebandingnya antara pengeluaran dan pendapatan yang diterima penduduk.

Dalam bidang perekonomian, akibat krisis *malaise* bagi penduduk pedesaan adalah berkurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Rakyat pedesaan akhirnya kembali lagi kepada ekonomi *subsistensi* seperti pada awal sebelum masuknya sistem pertanian modern dari Barat. Akibat yang dirasakan penduduk pedesaan di Klaten dengan adanya krisis ini, ternyata tidak selamanya harus diterima sebagai suatu hal yang tidak bisa diatasi. Penduduk pedesaan mulai mengembangkan lagi perkebunan rakyat yang dahulu pernah mereka tekuni. Penduduk pedesaan memanfaatkan tanah yang dulu ditanami tebu dengan menanam tanaman pangan yang lain, seperti singkong, jagung, yang akhirnya dapat dijual di pasar-pasar. Selama periode krisis, banyak pembatasan dan pengawasan yang dilakukan bagi perkebunan Eropa, namun hal ini sulit diterapkan terhadap perkebunan rakyat. Hasil perkebunan rakyat volume

produksinya meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 13 Produksi Perkebunan Eropa dan Perkebunan Rakyat
di Jawa tahun 1930 – 1935

Tahun	Produksi Perkebunan	Produksi Perkebunan Rakyat	Ekspor	Harga per kwintal (<i>gulden</i>)
	(dalam jutaan <i>gulden</i>)			
1930	40	54	63	52,90
1931	49	54	70	36,30
1932	63	70	116	39,03
1933	57	50	72	31,87
1934	64	49	82	25,97
1935	55	56	81	20,12

Sumber : Boeke, 1951

Dibukanya kembali perkebunan rakyat pada tahun 1930, sedikit dapat mengatasi akibat yang ditimbulkan dari krisis *malaise*, walaupun tidak secara maksimal.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

PG Gondangwinangun adalah salah satu dari sembilan PG yang ada di Kabupaten Klaten. Didirikan pada waktu di Jawa masih diberlakukan sistem tanam paksa, tepatnya pada tahun 1860 oleh *NV. Klatensche Cultuur Matschapij (KCM)* yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Pada awal berdirinya pengelolaan dilakukan oleh keluarga Jongkhervan der Wijk. Pada tahun 1865 pengelolaan PG Gondangwinangun dilakukan oleh *NV. Mirrandole Voute & Co* yang berkedudukan di Semarang. Pengalihan pengelolaan PG Gondangwinangun ini karena untuk mengelola sebuah PG sebesar PG Gondangwinangun, diperlukan suatu manajemen dan struktur organisasi yang teratur. Dalam pengelolaannya, PG Gondangwinangun menjalin hubungan kerja sama yang intensif dengan masyarakat di wilayah Kabupaten Klaten, yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian sewa-menyewa tanah yang dilakukan untuk jangka waktu 21,5 tahun. Selain menyewa tanah di wilayah Kabupaten Klaten, PG Gondangwinangun juga menyewa tanah di wilayah Semarang dengan pertimbangan harga sewa tanahnya

mudah dan tersedianya sarana transportasi yang memadai guna mengangkut tebu dari Semarang ke PG Gondangwinangun. Perjanjian sewa-menyewa tanah itu diadakan langsung antara pimpinan pabrik dan kepala desa terutama desa-desa yang terdapat lahan komunal. Selain dalam bentuk perjanjian sewa-menyewa tanah, hubungan kerjasama antara pihak PG Gondangwinangun dengan masyarakat di wilayah Kabupaten Klaten adalah dalam bentuk pengerahan tenaga kerja melalui perantara para kepala desa.

Terjadinya krisis *malaise* tahun 1930 membawa akibat yang sangat dalam bagi PG Gondangwinangun, yaitu terhentinya produksi gula sejak tahun 1930 sampai dengan tahun 1935. Penghentian produksi dikarenakan jatuhnya harga gula di pasaran dunia, karena gula dalam jumlah yang besar, tidak dapat dijual dengan harga yang sesuai. Ditutupnya PG Gondangwinangun, berpengaruh juga terhadap tenaga kerja yang bekerja di PG Gondangwinangun, yang terdiri dari tenaga tetap dan tenaga tidak tetap. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di PG Gondangwinangun, mengalami pengurangan pada tahun 1936 dengan tujuan untuk efisiensi biaya produksi. Pengurangan terbesar dilakukan untuk tenaga tidak tetap yang terdiri dari tenaga musiman dan tenaga borongan. Sedangkan untuk tenaga tetap hanya mengalami pengurangan yang relatif kecil.

Krisis *malaise* juga berpengaruh terhadap tingkat upah yang diterima oleh para pekerja PG Gondangwinangun. Upah yang diterima pada masa sebelum krisis turun setelah terjadinya krisis. Akibat yang lebih luas justru sangat dirasakan oleh para petani, khususnya petani penggarap di pedesaan. Karena dengan ditutupnya pabrik-pabrik, hal ini berarti berkurangnya sumber pendapatan lain selain dari menggarap tanah. Kehadiran PG di Kabupaten Klaten paling tidak dapat menambah *income* bagi para petani, karena mereka bisa bekerja di perkebunan atau di pabriknya dan hal ini berarti ada penghasilan yang mereka terima walaupun sangat minim. Dalam bidang perekonomian, akibat krisis *malaise* bagi penduduk pedesaan adalah berkurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Rakyat pedesaan akhirnya kembali lagi kepada ekonomi *subsistensi* seperti pada awal sebelum masuknya sistem pertanian modern dari Barat. Namun penduduk pedesaan mencoba untuk mengurangi akibat yang

ditimbulkan oleh krisis *malaise* dengan cara mengembangkan lagi perkebunan rakyat yang dahulu pernah mereka jalankan sebelum masuknya perkebunan modern.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, maka muncul implikasi yang dapat dipandang dari beberapa segi:

1. Teoritis

Krisis *malaise* membawa pengaruh yang kuat bagi perkembangan industri gula. Hal ini dikarenakan banyak PG yang terpaksa harus menghentikan produksinya akibat jatuhnya harga di pasaran dunia. Selain itu *malaise* juga membawa akibat yang luas bagi sektor tenaga kerja, karena dengan di hentikannya produksi gula di PG, maka berakibat terjadi pengangguran yang besar.

2. Praktis

Ditutupnya PG Gondangwinangun pada tahun 1930 sampai 1935, membawa akibat yang dalam bagi PG Gondangwinangun. Produksi gula terhenti yang berakibat kepada tenaga kerja yang bekerja di PG. Jumlah tenaga kerja mengalami pengurangan sebagai upaya untuk efisiensi biaya produksi. Bagi petani pedesaan, terutama petani yang miskin dan tidak mempunyai tanah, ditutupnya PG Gondangwinangun berarti berkurangnya sumber penghasilan lain selain sebagai petani penggarap.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah

Kehancuran harga produksi gula yang dialami saat terjadinya krisis tahun 1930, akibat adanya kebijaksanaan yang dijalankan pemerintah kolonial sangat merugikan petani. Pemerintah saat ini dalam mengeluarkan kebijaksanaan

dalam bidang pertanian, harus mempertimbangkan faktor keadilan bagi petani yang nota bene adalah mayoritas dari penduduk Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang pertanian, haruslah mengacu pada kebijakan yang berorientasi pada pangsa pasar, karena dengan demikian para petani dapat menjual hasil pertaniannya bukan saja untuk memenuhi pangsa pasar di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Dengan kebijakan bidang pertanian yang berorientasi pada pangsa pasar, maka diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat. Selain itu pemerintah juga harus melindungi kepentingan petani dengan cara tidak melakukan impor pada produk-produk yang juga diusahakan oleh petani, seperti gula, padi dan kedelai.

2. Bagi Pendidik

Materi tentang pengaruh krisis *malaise* bagi industri gula, ada baiknya bila dimasukkan ke dalam kurikulum mata kuliah sejarah agraria, agar mahasiswa bisa mendapat pengetahuan tentang perkembangan industri gula di Jawa dan pengaruh krisis *malaise* bagi industri gula.

3. Bagi peneliti

Penelitian yang mengambil tema tentang krisis *malaise* 1930 dengan berbagai dampaknya belum banyak dilakukan. Untuk masa yang akan datang penulis mengharapkan ada mahasiswa yang melanjutkan penelitian tentang pengaruh krisis *malaise* secara lebih mendalam untuk bidang dan sektor yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Ismail.1999. *Pidato Politik PPP*, dalam www.ppp.or.id/pidato2html
- Ashardikoen. 1978. *Ekonomi Perindustrian Gula di Indonesia*, makalah dalam Kongres Ikatan Ahli Gula Indonesia ke III tanggal 7-8 Nopember
- BAPEPAM. 1999. *Sejarah Pasar Modal di Indonesia*, di dalam www.bapepam.go.id/profil/sejarah
- Bernstein.1998. *Marxisme, Suatu Kenyataan*, di dalam www.marxist.com/indonesia/ror/5/html
- Billah, M.M. 1997. *Segi Penguasaan Tanah dan Dinamika Sosial di Pedesaan Jawa (Tengah)*, di dalam Sediono M.P. Tjondronegoro & Gunawan Wiradi *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta : PT Gramedia
- Boeke, J.H. 1948. *Ontwikkelingsgang en To Ekomst Van Bevolking en Ondernemings Landbouw in Nederlands Indie*. Leiden : E.J. Brill
- _____. 1947. *The Evolution of Netherlands Indies Economy*. Haarlem : H.D. Tjenk Willink & ZN
- Booth, Anne Wlliam J.O' Malley & Anna Weidenmann. 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES
- Bugard, Rord. 1922. *History of Colonialism*. New York : Princeton

- Burger, D.H. 1962. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid I*. Jakarta : Pradnja Paramita
- _____. 1970. *Sedjarah Ekonomis Sosiologi Indonesia II*. Jakarta : Pradnja Paramita
- Creuzberg, Peter & Van Laanen.1987. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- De Vries, Egbert. 1985. *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan Gramedia
- Departemen Pertanian Republik Indonesia. 1997. *Keputusan Menteri Pertanian No. 940/kpts.OT.210/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian*, dalam www.deptan.go.id/kpts

82

- Sumitro Djojohadikusumo. 1972. *Kebijaksanaan di Bidang Ekonomi Perdagangan*. Jakarta : Yayasan penyuluh Penerangan Perdagangan
- _____. 1989. *Indonesia dalam Perkembangan Dunia: Kini dan Masa Datang*. Jakarta : LP3ES
- Edisi Khusus Bank Bumi Daya.1983. *Sugar Production and Marketing Review of Sugar in Indonesia*. Jakarta : Bank Bumi Daya
- Encyclopedia Soviet Yang Agung*. 1953. New York : Holt, Reinhart & Winston
- Encyclopedia of the Social Science*. 1989. Princeton, NJ: College Board Publications
- Garraty, John A. 2002. *Memori Seorang Kakek*, di dalam P Swantoro *Dari Buku Sambung Menyambung Menjadi Satu*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, di dalam www.kompas.com/kompas-cetak/0204/seni/tinj05.htm
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta : Bhratara Karya Aksara
- Gonggrijp. 1938. *Schets eener Economische Geschiedenis Van Nederlansch-Indie*. Haarlem
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Universitas Indonesia Press

- _____. 1985. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Hardiman Joedo. 1982. *Sejarah Singkat Perkembangan Pabrik-pabrik Gula di daerah Jateng*. Solo : Team Pendirian Museum Gula
- Helius Sjamsuddin. 1994. *Metodologi Sejarah*. Jakarta : Depdikbud
- Hersri Setiawan. 1998. *Sang Penggugat*, di dalam www.megaforpresident.org/bk/hutbk-4htm
- Ibrahim Alfian. 1987. *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis: Kumpulan Karangan dipersembahkan Kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Kansil, C.S.T & Julianto. 1986. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Kartini Kartono. 1990. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Rajawali
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suriname. 1999. *Mengenal Suriname*, di dalam www.aksaronesia.sr/html/03rahsur.html
- Koentjoroningrat. 1984. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Penerbitan fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Kuntowidjojo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Lembaga Pendidikan Perkebunan. 1992. *Seri Manajemen Usaha Perkebunan: Perkebunan Gula*. Yogyakarta : ANDI OFFSET
- Lexy J. Moleong 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Remaja
- Malley, William J.O'. 1988. *Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar*, di dalam Anne Booth, William J.O'Malley & Anna Weidenmann *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES
- Moh. Hatta. 1935. *Krisis Ekonomi dan Kapitalisme*. Batavia : Soetan Lembag Toeah & Fa
- Mubyarto. 1978. *TRI dan Masalah Pelaksanaannya*, di dalam Agro Ekonomi No. 8. Yogyakarta : PERHEPI
- _____. 1991. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan*. Yogyakarta : Aditya Media

- Mubyarto & Daryanti. 1991. *Gula : Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta : Aditya Media
- Muh. Ma'rufin Sudibyo. 1998. *Krisis Ekonomi Melanda Dunia*, di dalam Princesspml@hotmail.com
- Ninik Handayani, M. 1998. *Krisis dan Penyebabnya*, di dalam www.iqeq.web.id/art/art15.shtml
- Peter Salim & Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press
- PG. Gondang Baru. 1995. *Riwayat Singkat PT. Perkebunan XV-XVI (Persero) PG. Gondang Baru*. Klaten : PG Gondang Baru
- Proyek Pembinaan Peninggalan Sejarah, Purbakala, dan Permuseuman Propinsi Jawa Tengah. 2001. *Laporan Studi Dokumentasi dan Publikasi PG Gondang Baru*. Semarang : Tiara wacana
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Depdikbud
- _____. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Roeslan Abdulgani. 1967. *Nasionalisme Asia*. Djakarta : Prapantja
- Roll, Werner. 1983. *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia : Studi Kasus Daerah Surakarta Jawa Tengah*. Jakarta : CV Rajawali
- Rutgers, J. & A. Hubner. 1937. *Indonesie Vol 2*. Amsterdam
- Sartono Kartodirdjo. 1984. *Beberapa Segi Perkembangan Perkebunan pada Masa Kolonial*, di dalam Seminar Evaluasi Perkembangan dan Prospek PIR Perkebunan. Yogyakarta: Lembaga Pendidikan Perkebunan
- _____. 1987. *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- _____. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia baru : Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2* . Jakarta : Gramedia
- _____. 1990. *Sejarah Pergerakan Indonesia, Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta : Gramedia

- _____. 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2*. Jakarta : Gramedia
- _____. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia, kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta : Aditya Media
- Scout, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta : LP3ES
- Selo Soemarjan. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti dan Forum
- Sigit Susanto. 1998. *Sosialisme di Kuba : Antara Idealisme dan Kemerdekaan*, di dalam www.geocities.com/apii-berlin/aktual/sosialisme_kuba.html
- Soeharjo Hatmosoeprbo. 1995. *Pemerintahan Kolonial Pada Abad XIX dan Perintis Pegerakan Nasional*, di dalam Sartono Kartodirdjo, dkk *Negara dan Nasionalisme Indonesia, Integrasi, Disintegrasi dan Suksesi*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Soerjono Soekanto. 1984. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta : Rajawali
- _____. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soekarno. 1964. *Bangunlah Bangsa*. Djakarta : Djambatan
- Suhartoyo Hardjosatoto. 1985. *Sejarah Pergerakan Nasional*. Yogyakarta : Liberty
- Suhardi. 2000. *Kapitalisme Perkebunan dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Petani di Pasuruan Jawa Timur*, di dalam Laporan Penelitian Fakultas Sastra UNS. Surakarta : Sebelas Maret University Press
- Suhartono. 1991. *Apanage dan bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana
- Susanto, AB. 1998. *Bagaimana Cara Menanggulangi Krisis ?*, di dalam www.vision.net.id/tiara/art/art15.shtml

- Sosro. 2000. *Sejarah Teh di Dunia*, dalam www.sosro.id/ror/html
- Tanumidjaja, R.M.A. 1983. *Sejarah Perkebunan dan Perkembangan Organisasi Karyawan/ Buruh di Perindustrian Gula*. Yogyakarta : Lembaga Pendidikan Perkebunan
- Wertheim. 1978. *Indonesie Van Vorsten rijk tot neo Kolonien*. Leiden : Boom Meppel
- Widjojo Nitisastro. 1978. *Population Trends in Indonesia*. Ithaca : Cornell University Press
- Yasuo, Uemura. 1986. *Perkembangan Tebu dan Masyarakat Pedesaan di Jawa*, di dalam Akira Nagazumi *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Yayasan Agroekonomi. 1983. *Industri Perkebunan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia
- Yudana. 1989. *Sejarah Kontemporer Dunia*. Bandung : Ganeca
- B. Arsip, Majalah dan Surat Kabar**
- Adres Boek Voor de Java Suiker Industrie Jaargang Suiker Fabriek Goendang Winangoen 1930*
- Het Particuliere Landbouwcrediet in het Soenanat Soerakarta*. 1939, di dalam *Volkcredietwezen/ Batavia*
- Jaarverslag Bijlagen Deel II Oogstjaar 1930-1942*
- Koloniaal Verslag 1930*
- Malley, William J.O. 1983. Agustus. “*Indonesia di Masa malaise: Suatu Studi terhadap Sumatera Timur dan Yogyakarta di tahun 1930-an*”. Prisma. 8
- Proefstation Voor De Java-Suikerindustrie, Mededeelingen Jaargang : 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941*
- S. Taat Maryanto. 1991. Pebruari. 16. “*Melihat Museum Gula di PG. Gondang Baru*”. Suara Merdeka

Kartu Praktek Kerja di PG Gondang Baru Klaten

Kronologis PG Gondangwinangun Klaten

- Tahun 1860** : Didirikan oleh *NV. Klatensche Cultuur Matschapij (KCM)* yang berkedudukan di Amsterdam (Nederland)
- Tahun 1865** : Pengelolaan dilakukan oleh *NV. Mirrandole Voute & Co* yang berkedudukan di Semarang
- Tahun 1930-1935** : Akibat Krisis Ekonomi Dunia (*Malaise*), PG Gondangwinangun tidak menggiling tebu (berhenti produksi)
- Tahun 1935-1942** : Pabrik mulai berproduksi lagi dan tahun 1940 mencapai puncak produksi tertinggi
- Tahun 1942-1945** : PG Gondangwinangun dikuasai oleh pemerintahan pendudukan Jepang

- Tahun 1945** : PG Gondangwinangun dikuasai oleh bangsa Indonesia, yang kemudian dikelola oleh Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN), yang dipimpin oleh Bapak Doekoet tahun 1945-1948
- Tahun 1948** : PG Gondangwinangun tidak berproduksi lagi akibat terjadinya Clash II
- Tahun 1948-1950** : Mulai beroperasi lagi dibawah pimpinan Ali Basyad
- Tahun 1957** : PG Gondangwinangun menjadi milik bangsa Indonesia sebagai hasil dari KMB. Pengawasan diserahkan kepada Perusahaan Negara Perkebunan (PPN) Unit Semarang A yang dipimpin oleh Bapak R. Soepeno tahun 1957-1960. Nama PG Gondangwinangun diubah menjadi PG Gondang Baru PT
- Tahun 1964** : PG Gondang Baru PT dimasukkan dalam PPN (Perusahaan Perkebunan Negara) Jawa Tengah V di Solo tanggal 1 Juli 1964 dan berganti nama menjadi PG Gondang Baru

Tahun 1968: PPN Jawa Tengah V dibubarkan dan dibentuk PNP (Perusahaan Negara Perkebunan) XVI yang berkedudukan di Solo berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 tanggal 13 April 1968. Selanjutnya PG Gondang Baru masuk ke dalam lingkungan PNP XVI

Tahun 1981 : Berdasarkan PP No. 11 tanggal 13 April 1981, PNP XVI dibubarkan dan digabungkan ke dalam PTP XV (Persero) dan menjadi PT. Perkebunan XV-XVI (Persero) yang berkedudukan di Solo. Dalam hal ini PG Gondang Baru juga masuk di dalamnya.

Sumber : Riwayat Singkat PT Perkebunan XV-XVI (persero) PG Gondang Baru,
1995

Daftar Instrumen Pertanyaan

A. PG Gondangwinangun

1. Bagaimana sejarah berdirinya PG Gondangwinangun Klaten ?
2. Siapakah yang mendirikan PG GondangwinangunKlaten ?
3. Pada awal pendiriannya, bagaimana bentuk badan usaha dan status PG Gondangwinangun ?

4. Bagaimanakah Struktur Organisasi PG Gondangwinangun ?
5. Dalam menjalankan operasionalnya, darimanakah modal yang didapat oleh PG Gondangwinangun ?
6. Meliputi daerah mana sajakah areal PG Gondangwinangun ?
7. Bagaimanakah cara PG Gondangwinangun mendapatkan tanah untuk penanaman tebu ?
8. Terdiri dari unsur apa sajakah tenaga kerja yang ada di PG Gondangwinangun?
9. Bagaimanakah usaha PG Gondangwinangun memperoleh tenaga kerja untuk mengolah tanaman tebu ?

B. Krisis *Malaise* dan PG Gondangwinangun

1. Apakah krisis *malaise* itu ?
2. Bagaimanakah pengaruh krisis *malaise* bagi PG Gondangwinangun di bidang produksi gula ?
3. Bagaimanakah pengaruh krisis *malaise* bagi PG Gondangwinangun di bidang tenaga kerja ?
4. Bagaimanakah pengaruh krisis *malaise* bagi PG Gondangwinangun di bidang upah pekerja ?
5. Bagaimanakah pengaruh krisis *malaise* bagi masyarakat pedesaan di Kabupaten Klaten ?

Daftar Narasumber

- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : Drs. Bimo |
| Usia | : 35 tahun |
| Alamat | : Merbung, Krapyak, Klaten Selatan, Klaten |
| Jabatan | : Staff bagian Perpustakaan PG Gondangwinangun dan staff Museum Gula Jawa Tengah |

2. Nama : Tukidjan
Usia : 80 tahun
Alamat : Ceper, Ceper, Klaten
Jabatan : Bekas Pekerja PG Gondangwinangun Klaten
tahun 1930